KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.01.01-0169 20 November 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I
di Jakarta

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.PR.04.05-098 Tanggal 11 Agustus 2025 Hal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kantor Wilayah Menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Berkenan dengan hal tesebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BAB 1
PENDAHULUAN

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dalam perjalanannya, Kemenkumham bertransformasi menjadi 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen IMPAS). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Transformasi Kemenkumham berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tersebut berdampak kepada bidang pelaksanaan tugas, dimana jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) bidang fungsi yang menjadi Kementerian tersendiri, yaitu Bidang Hukum menjadi Kementerian Hukum, Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi serta cita-cita pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, yaitu

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Gambar 1. *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit Eselon I. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, serta program strategis Kementerian Hukum yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kementerian. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta mendukung tujuan besar pembangunan nasional, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini dijabarkan dan diimplementasikan di seluruh unit kerja, termasuk di wilayah, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Renstra Kemenkum Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lima tahun ke depan, yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, visi Kementerian Hukum yakni terwujudnya supremasi hukum, serta kebutuhan pembangunan hukum di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah;
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam struktur berikut Struktur Organisasi

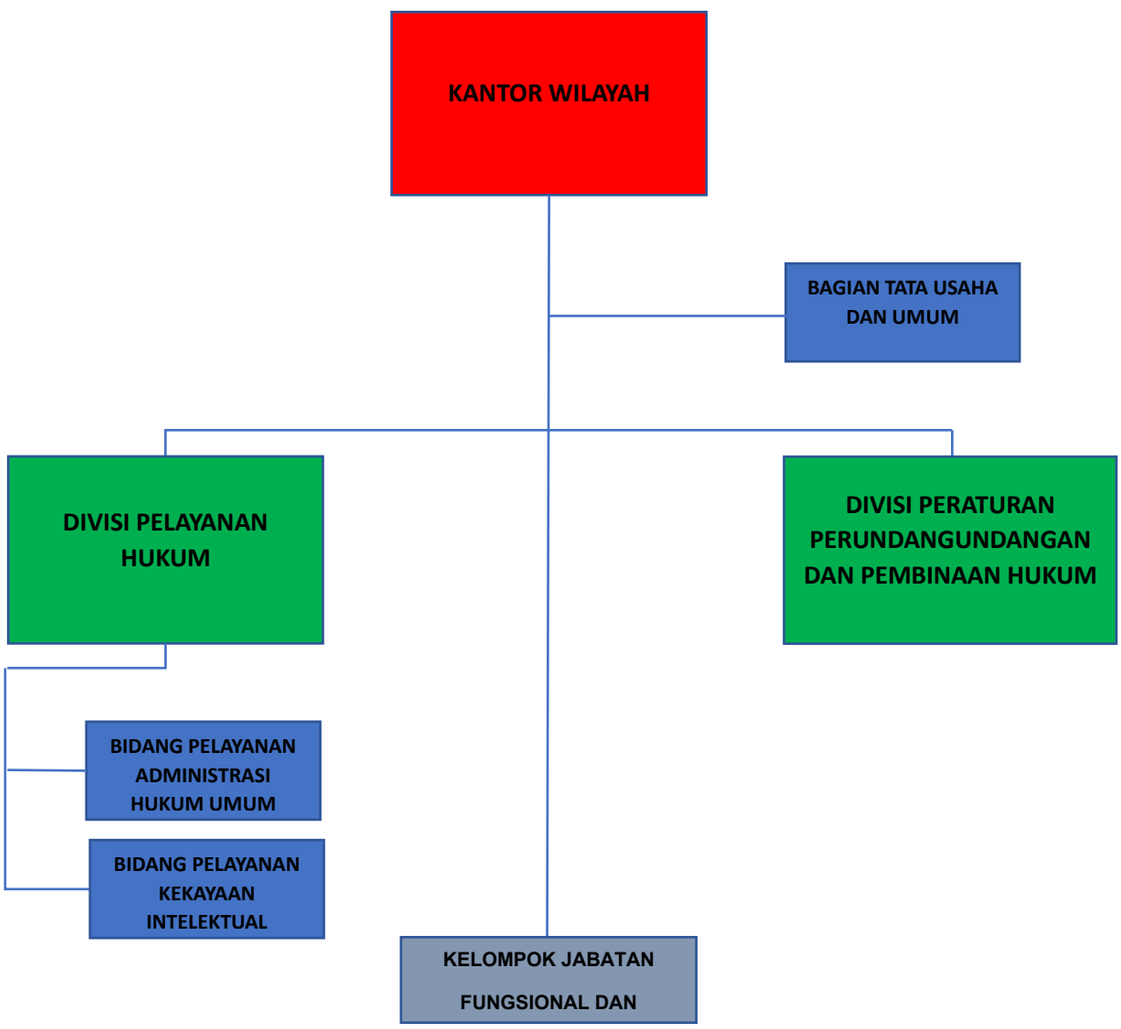

Gambar 2. *Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel*

Unit	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Kantor Wilayah	1	0	1
Divisi Pelayanan Hukum	9	7	16
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	39	27	66
Bagian Tata Usaha dan Umum	38	21	59
Total	**87**	**55**	**142**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

A. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum adalah bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan hukum, sesuai kebijakan teknis dari Direktorat Jenderal terkait. Divisi ini memiliki dua fungsi utama :

1. Pembinaan dan Pengendalian : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di wilayah.
2. Kerja Sama, Pemantauan, dan Evaluasi : Menjalin kerja sama, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidan Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian

mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan

3. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut

Keterangan	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
Jumlah Layanan AHU	173.576	139.009	126.501	105.509	92.690

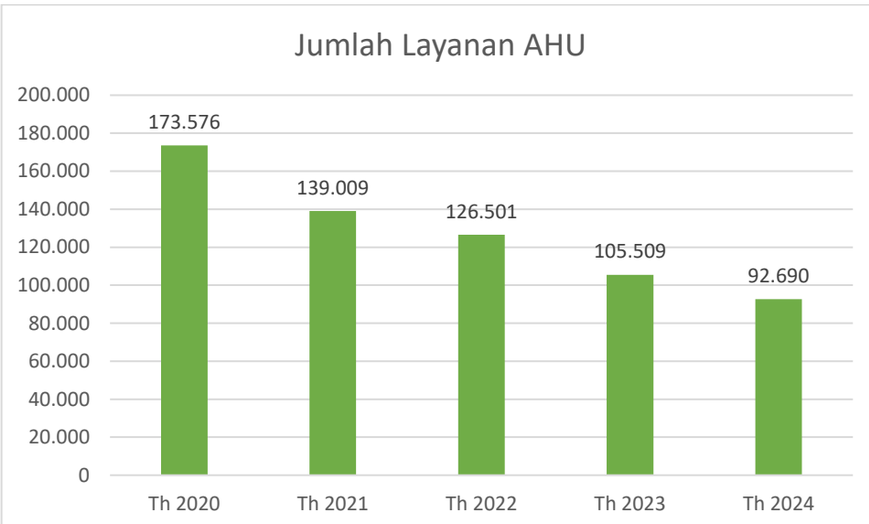

Gambar 3. Jumlah Layanan AHU Tahun 2020-2024

Keterangan	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
PNBP AHU	19.235.950.000	15.252.100.000	15.225.450.000	12.484.050.000	8.286.600.000

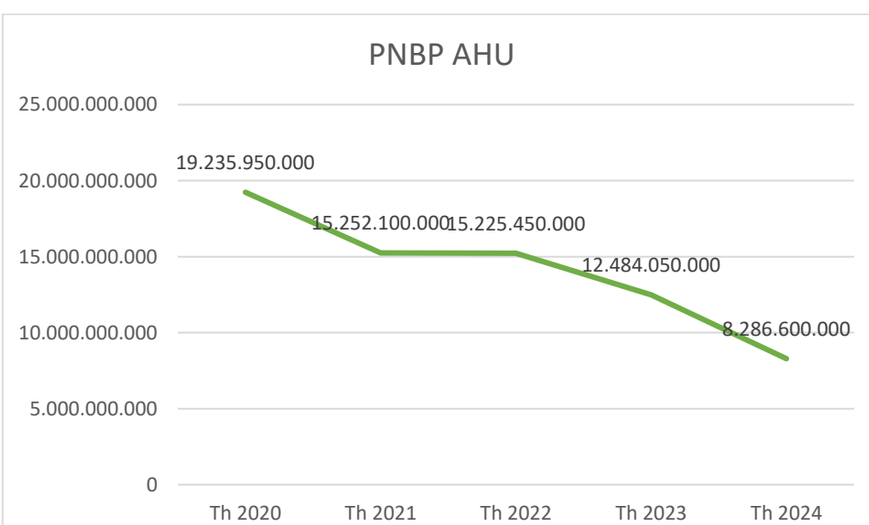

Gambar 4. PNBP AHU Tahun 2020 – 2024

2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain: − Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2020 – 2024:

Keterangan	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
Jumlah Layanan KI	2.099	2.217	3.017	3.268	4.186

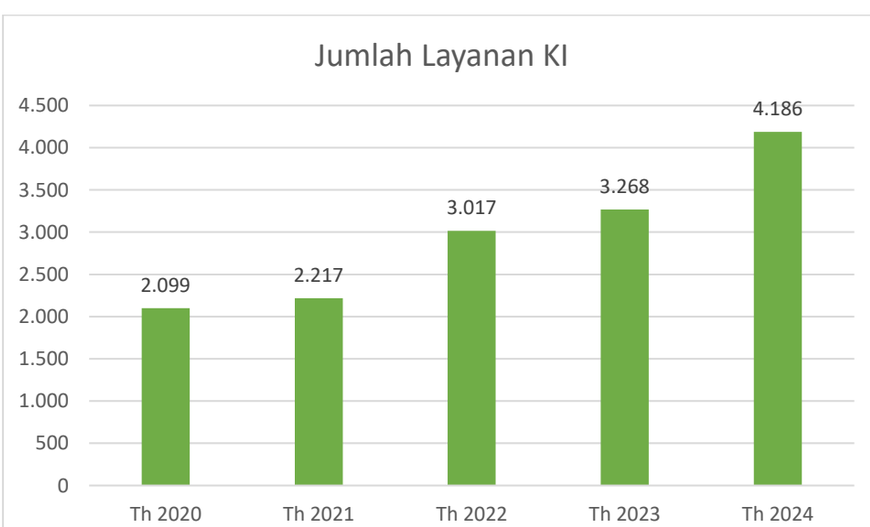

Gambar 5. Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2020- 2024

3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional terdiri dari pegawai dengan keahlian tertentu yang bekerja berdasarkan tugas dan kompetensi masing-masing, seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, atau penyuluh hukum.

Jabatan Pelaksana mendukung pelaksanaan administrasi dan teknis kegiatan harian divisi sesuai arahan pimpinan dan bidang terkait.

B. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;

5. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
6. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
8. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

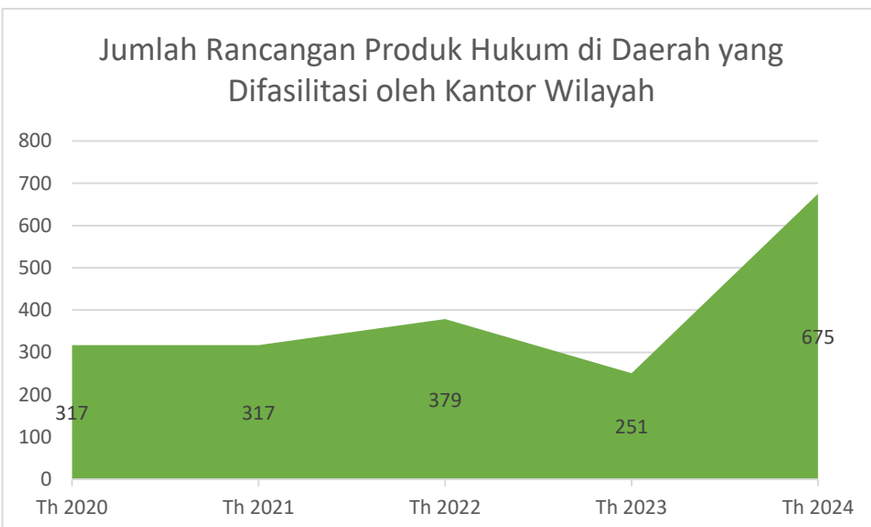

Gambar 6. *Jumlah Rancangan Produk Hukum*

No	Keterangan	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
1	Jumlah rekomendasi kebijakan hukum dan HAM yang dihasilkan	4	4	4	4	4
2	Jumlah Rekomendasi kebijakan Hukum dan HAM yang dimanfaatkan	4	4	4	4	4

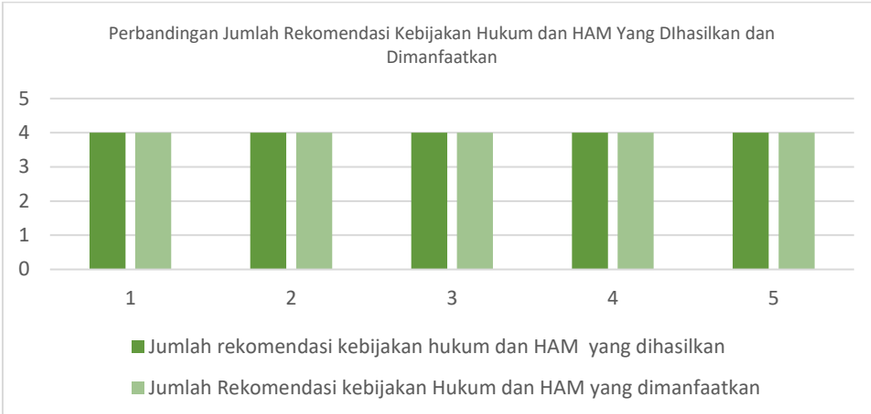

Gambar 7. *Perbandingan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM Yang Dihasilkan dan Dimanfaatkan*

C. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Adapun fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah:

a) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
d) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
e) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

DIPA Kanwil Sumsel	Th 2020			Th 2021			Th 2022			Th 2023			Th 2024		
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
Setjen	19.362.722.000	19.108.021.185	98,68	25.395.959.000	24.559.548.947	96,71	26.337.462.000	26.204.402.850	99,49	24.321.131.000	23.916.260.342	98,34	24.321.131.000	23.916.260.342	98,34
AHU	2.239.000.000	1.658.792.382	74,09	2.143.400.000	1.917.978.934	89,48	2.298.000.000	2.249.836.076	97,90	2.527.800.000	2.475.054.164	97,91	2.939.735.000	2.859.434.233	97,27
KI	844.006.000	680.284.150	80,60	1.114.006.000	970.742.355	87,14	1.133.102.000	1.121.253.887	98,95	1.439.387.000	1.426.729.708	99,12	1.875.570.000	1.846.584.518	98,45
PP	188.422.000	140.779.757	74,72	275.000.000	244.071.420	88,75	275.000.000	268.458.800	97,62	355.000.000	353.669.400	99,63	455.000.000	453.530.527	99,68
BPHN	1.610.931.000	1.504.021.343	93,36	1.814.059.000	1.678.412.025	92,52	1.120.640.000	1.080.264.000	96,40	1.765.933.000	1.722.487.370	97,54	1.670.927.000	1.621.971.700	97,07
BSK	69.086.000	68.955.200	99,81	214.073.000	213.583.550	99,77	169.839.000	169.602.830	99,86	214.073.000	213.663.175	99,81	285.196.000	282.787.309	99,16
Jumlah	**24.314.167.000**	**23.160.854.017**	**95,26**	**30.956.497.000**	**29.584.337.231**	**95,57**	**31.334.043.000**	**31.093.818.443**	**99,23**	**30.623.324.000**	**30.107.864.159**	**98,32**	**31.547.559.000**	**30.980.568.629**	**98,20**

***Gambar 8**. Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024*

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

1. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN
2. Format penulisan Visi K/L: "……. (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan …… (rumusan Visi Presiden)"
3. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga
4. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
5. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
6. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
7. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
8. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
9. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan - 115 - Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum melalu Kantor Wilayah Sumatera Selatan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 di Wilayah Sumatera Selatan melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum**. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum**. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum**. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum**. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025- 2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi: a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat b. Kesetaraan di hadapan hukum c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan f. Kepastian hukum g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan
2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada: a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat b. Kepercayaan investor c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (impact), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
2. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi
3. Misi berlaku pada periode tertentu;
4. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/ Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
6. Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. **Misi #1**: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
2. **Misi #2**: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih. Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;
4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan
5. Tujuan dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. **Tujuan 1**: Meningkatnya pembangunan hukum Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum
2. **Tujuan 2**: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum. Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (impact) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
2) Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
5) Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab- akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
6) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
7) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
8) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
    a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
    b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

9) Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
   a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
   b. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan dapat diuraikan pada sub Pohon Kinerja.

D.1 Singkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kantor wilayah. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 41 potensi risiko **pada 13 Sasaran Kegiatan (SK)** dengan hasil sebagai berikut:

1. SK.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

   Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pemahaman Masyarakat

terhadap Layanan AHU di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
2) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industry;
3) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
    a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
    b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
    c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
    d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.

2. SK 2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

   Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

   1) Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW) belum optimal;
   2) Terkendala dalam pemanggilan atau kehadiran pihak terkait (notaris, pelapor, saksi).

3. SK 3 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

   Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar

Pelayanan. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industry;
2) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;

4. SK 4 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

   Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

   1) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
      a. Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
      b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi.

5. SK 5 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

   Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

   1) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama.

6. SK 6 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan IKK 2 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
2) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

7. SK 7 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

   Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

   1) Keterpihakan pada kepentingan lembaga masing- masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/Lembaga;
   2) Koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan Biro Hukum Pemda yang belum optimal.

8. SK 8 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

   Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH), saat ini baru 14 OBH yg terintegrasi yg tersebar di 6 Kabupaten /Kota dan msh 11 Kab/kota yg belum memiliki OBH terakreditasi. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan hukum gratis thdp masyarakat miskin tidak merata. Sdh bbrp kali diadakan penjaringan OBH baru namun belum memenuhi kebutuha di Kab/Kota yang belum tersedia OBH, karena keputusan kelulusan akreditasi berada di pusat/BPHN.
2) masih lemahnya kesadaran OBH untuk melakukan penyuluhan hukum ataupun konsultasi hukum diwilayahnya yg akan mengakibatkan masyarakat miskin tidak mengetahui haknya utk mendptkan bantuan hukum gratis.
3) Dokumen administratif permohonan bantuan hukum melalui aplikasi sidbankum perlu dilakukan monitoring / pengawasan secara langsung, untuk menghindari ketidaksesuaian administrasi serta pertanggung jawaban dokumen yg diupload melalui aplikasi.

9. SK 9 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

   Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

   1) Kurangnya jumlah dan kompetensi pengelola JDIH. Bahwa pada Kanwil dan kabupaten / kota diwilayah provinsi Sumsel kekurangan jumlah pengelola JDIH bahkan ada bbrp Kabupaten Kota belum memiliki pengelola JDIH hal ini mengakibatkan pengelolaan JDIH diwilayah tidak maksimal.
   2) Sistem atau server JDIH sering mengalami gangguan sedangkan untuk memperbaiki sistem atau server Kanwil/ Kabupaten /Kota harus berkoordinasi ke pusat.
   3) kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap penguatan pengelolaan JDIH diwilayah.
   4) Masyarakat diwilayah belum banyak mengetahui akses dan pemanfaatan jdih, ini dikarenakan kurangnya penyebarluasan informasi mengenai jdih di wilayah.

10. SK 10 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum di Tingkat kabupaten/kota Sumatera Selatan;
2) Belum tersedianya anggaran pelatihan bagi paralegal desa/kelurahan pada posbankum;
3) Belum tersedianya anggaran pengawasan posbankum;
4) Sarana dan prasarana Penyuluh Hukum yang belum memadai;
5) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tidak optimal.

11. SK 11 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

1) Kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja karena tidak semua unit teknis memahami secara utuh substansi dan urgensi rekomendasi hasil kajian strategi kebijakan hukum, sehingga tindak lanjutnya belum optimal;
2) Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Pelaksanaan tindak lanjut sering terkendala dengan beban kerja tinggi, keterbatasan personel yang memahami substansi kebijakan hukum, serta waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan prioritas lainnya.
3) Belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Proses monitoring tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem pelaporan kinerja, sehingga progresnya sulit diukur secara akurat.
4) Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Kegiatan yang bersifat analisis dan tindak lanjut kebijakan memerlukan dukungan biaya operasional dan sarana komunikasi yang memadai, yang terkadang belum teralokasi secara khusus
5) Tingkat pemahaman dan komitmen pelaksana di wilayah yang beragam

Tidak semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya rekomendasi hasil kajian, sehingga respons dan implementasi di daerah menjadi tidak seragam.

12. SK 12 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

    Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

    1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    2) Perubahan atau rotasi pejabat penanggung jawab;
    3) Koordinasi antar unit kerja belum optimal atau kurangnya pemahaman atas rekomendasi BPK.

13. SK 13 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

    Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen. Dalam pencapaian IKK terdapat potensi risiko yang telah dipetakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yaitu:

    1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
    2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
    3) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
    4) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
    5) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;

6) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
7) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
8) Tidak tercapaian target capaian reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar tim kerja dan data dukung yan gkurnag memadai.

D.2 Pohon Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada **Asta Cita ke 7, yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi**. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) adalah “Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum. FO.1 ini akan terwujud melalui Critical Success Factor (CSF) 1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu: 1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Indeks Budaya Hukum (IPH) 3. Indeks Materi Hukum (IPH).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum untuk wilayah Sumatera Selatan melaksanakan 13 sasaran kegiatan dengan 14 Indikator Kegiatan Kinerja yang tergambar pada pohon kinerja berikut:

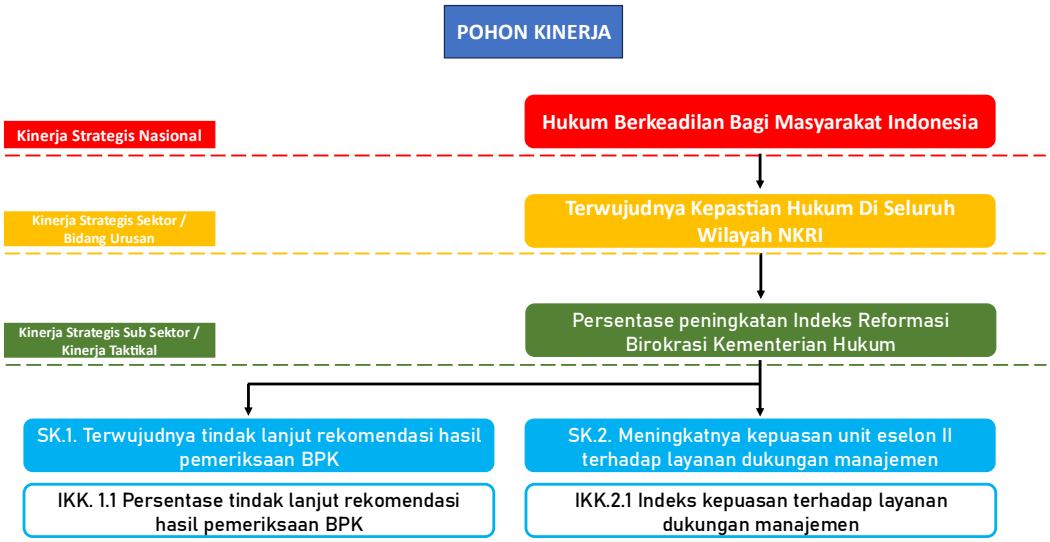

Gambar. 9 Pohon Kinerja SK.1 dan SK. 2

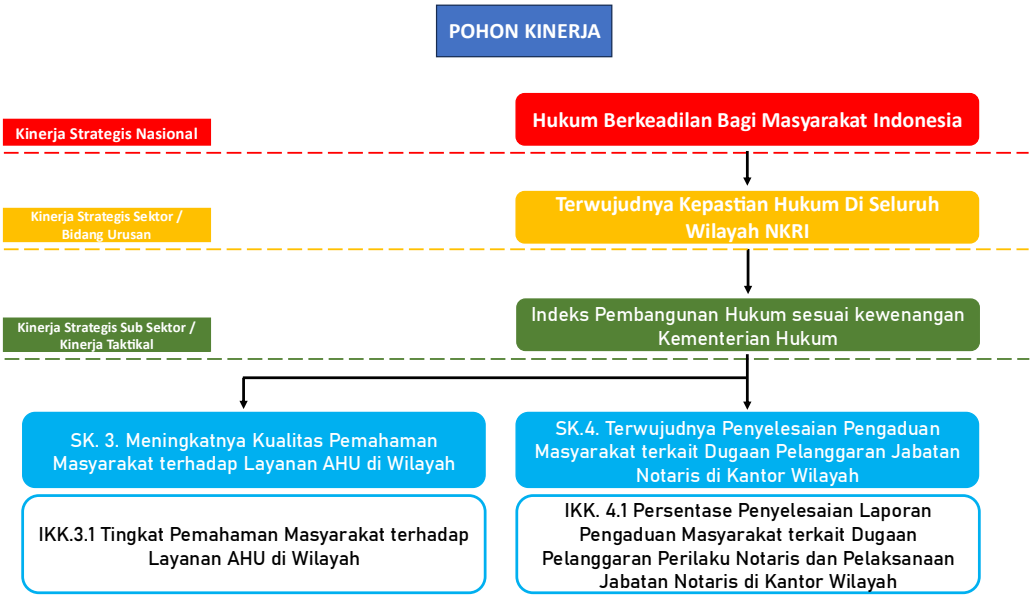

Gambar 10. Pohon Kinerja SK3 danSK.4

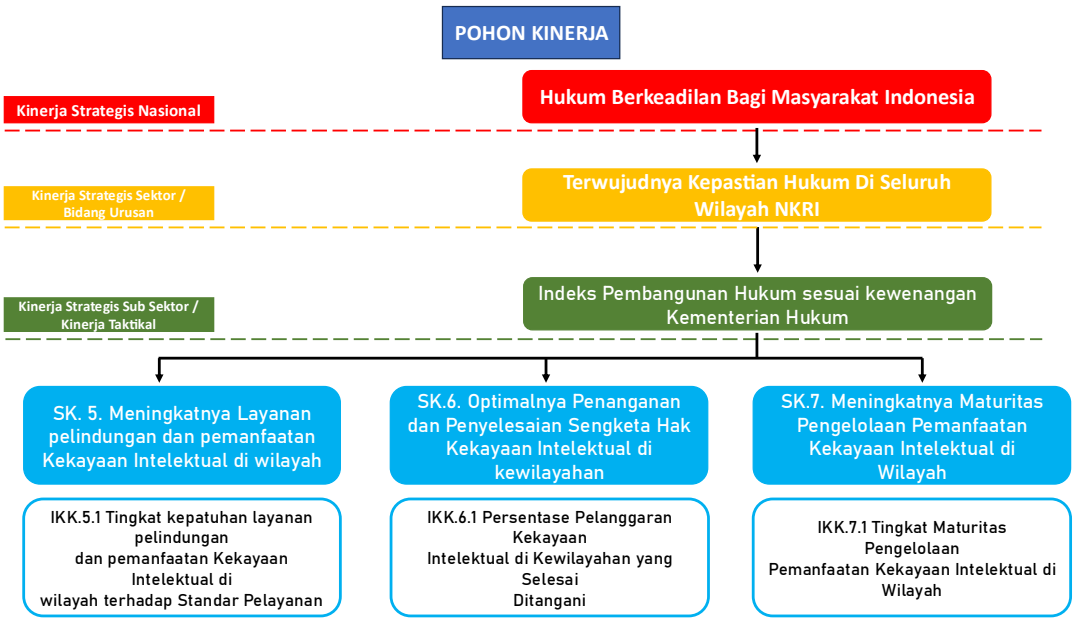

Gambar 11. Pohon Kinerja SK.5, SK.6 dan SK.7

Gambar 12. Pohon Kinerja SK.8

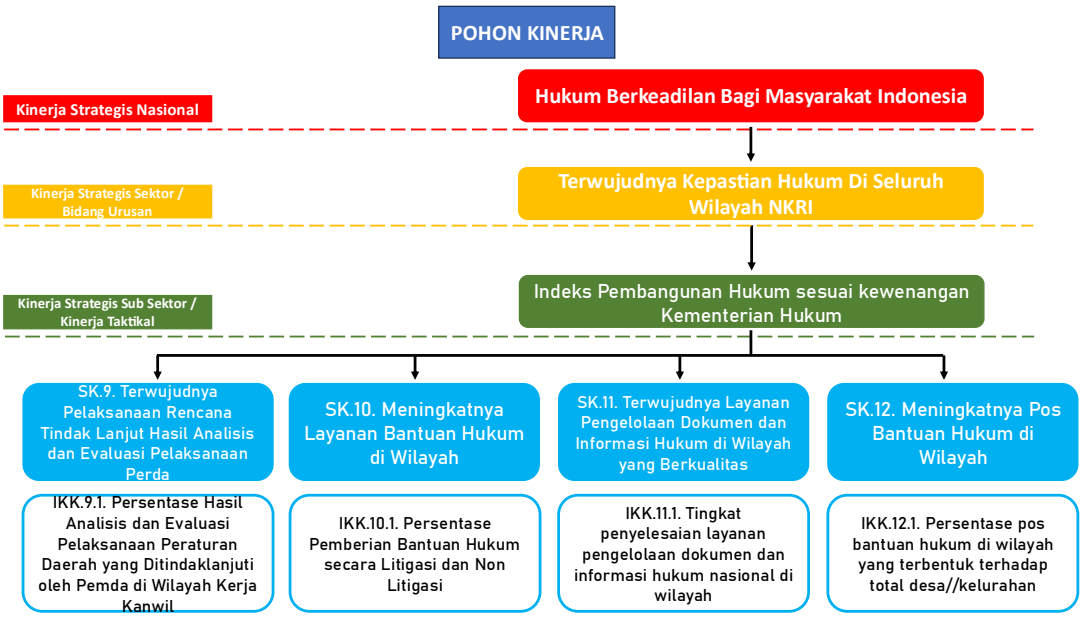

Gambar 13. Pohon Kinerja Sk.9, SK.19, Sk.11, dan SK. 12

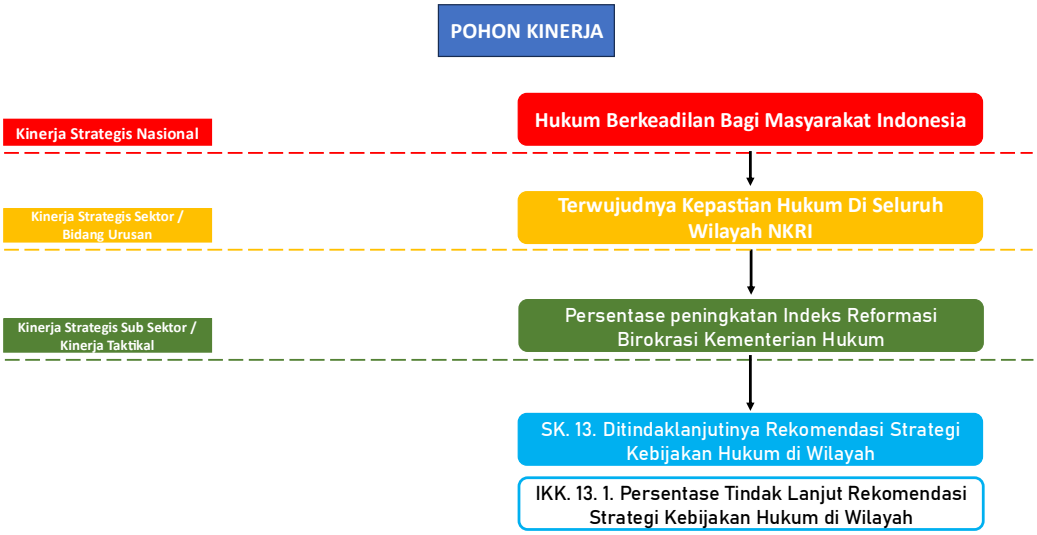

Gambar 14. Pohon Kinerja SK.13

D.2.1 Penerjemahan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Penerjemahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

PENERJEMAHAN SK.1 DAN SK.2

SK.1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

IKK.1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

SK.2. Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

IKK.2. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil
SK.2. Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	Kakanwil

Gambar 15. Penerjemahan SK.1 dan SK.2

PENERJEMAHAN SK.3 DAN SK.4

SK.1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

IKK.1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

SK.2. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

IKK.2. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	IKK.3.1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 indeks	3, 22 indeks	3, 24 indeks	3, 26 indeks	3, 28 indeks	Kakanwil /Div Pelayanan Hukum
SK.4. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK.4.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	Kakanwil /Div Pelayanan Hukum

Gambar 16. Penerjemahan SK.3 dan SK.4

PENERJEMAHAN SK.5, SK.6 DAN SK.7

SK.1. Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

IKK.1. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

SK.2. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan

IKK.2. Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

SK.3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

IKK.3. Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5. Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK.5.1. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%	Kakanwil /Div Pelayanan Hukum
SK.6. Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK.6.1. Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%	Kakanwil /Div Pelayanan Hukum
SK.7. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK.7.1. Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,5 Level	2,55 Level	2,6 Level	2,65 Level	Kakanwil /Div Pelayanan Hukum

Gambar 17. Penerjemahan SK.5, SK.6 dan SK.7

PENERJEMAHAN SK.8

SK.1. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

IKK.1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang - Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
IKK.2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang - Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.8. Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	IKK.8.1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil /Div PPPH
	IKK.8.2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kakanwil /Div PPPH

Gambar 18. Penerjemahan SK.8

PENERJEMAHAN SK.9, Sk. 10, SK.11, dan SK.12

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.9. Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	IKK.9.1. Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%	Kakanwil /Div PPPH
SK.10. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	IKK.10.1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%	Kakanwil /Div PPPH
SK.11. Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	IKK.11.1. Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%	Kakanwil /Div PPPH
SK.12. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK.12.1. Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	-	-	12%	13%	15%	Kakanwil /Div PPPH

Gambar 19. Penerjemahan SK.9, SK.10. SK.11 dan SK.11

PENERJEMAHAN SK. 13

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.13. Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	IKK.13.1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%	Kakanwil /Div PPPH

Gambar 20. Penjelasan SK.13

D.2.2 Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu **"PASTI BerAKHLAK"** yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan**

Inovatif (PASTI) serta **Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).**

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang - 159 - diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **PASTI** tersebut adalah:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan

sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait.

4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   - ✓ Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
   - ✓ Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
   - ✓ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

- ✓ Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   - ✓ Membantu orang lain belajar;
   - ✓ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
   - ✓ Suka menolong orang lain;
   - ✓ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
   - ✓ Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
   - ✓ Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
   - ✓ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
   - ✓ Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
   - ✓ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
   - ✓ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
   - ✓ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan 8 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Isu/Tantangan dan Peluang	Sasaran Utama	*Highlight* Intervensi
▪ Kondisi Hiper-Regulasi sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan. ▪ Belum optimalnya proses penanganan perkara. ▪ Rendahnya kepatuhan hukum Masyarakat dan penyelenggara negara	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi Target: Indeks Pembangunan Hukum **0,69** (2025) **0,73** (2029) Indeks Materi Hukum **0,51** (2025) **0,55** (2029)	▪ Penguatan tata Kelola regulasi **Instansi pelaksana**: Kementerian Hukum **Indikasi Lokasi:** Pusat **Sumber Dana :** APBN ▪ Penguatan Budaya Hukum **Instansi pelaksana**: Kementerian Hukum **Indikasi Lokasi:** Pusat **Sumber Dana :** APBN

Tabel. . Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi". Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. Indikator Program Prioritas
   - PP 07.02 Indeks Materi Hukum Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.
   - PP 07.02 Indeks Budaya Hukum Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum

(IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. Indikator Kegiatan Prioritas
   - KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.
   - KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.
   - KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.
   - KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 14. Kerangka Pembangunan Strategis Kementerian Hukum

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat ;
2. Kepercayaan investor;
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan .

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu Terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer).

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. **Pilar 1**: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. **Pilar 2**: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas.

   Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi hyper regulation.

3. **Pilar 3**: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

   Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi: a. Layanan pembinaan hukum nasional - 165 - b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional) d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4**: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik.

Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi: a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)
2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum
   a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.
   b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum. Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.
2. Arah Kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.
b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:
   1) Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
   2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)
c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:
   1) Layanan pembinaan hukum nasional
   2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)

3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045.

Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.
b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum. Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan
   a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.
   b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi: 1)

Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi: 1) Layanan pembinaan hukum nasional 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional) 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

   a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar

mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. 135.BB - Program Pembentukan Regulasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
    a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan
    b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan
    c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
    d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan
    e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
    f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
    g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
    h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
    i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
    j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah
2. 135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
    a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
    b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata
    c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana
    d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara
    e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
    f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
    g. 7112 - Administrasi Badan Usaha

h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual
j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

3. 135.WA - Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
    a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
    b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
    c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum
    d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi
    e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
    f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
    g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
    h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
    i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
    j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
    k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III

l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V.
n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum
o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
v. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
w. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
x. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
y. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
z. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
aa. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
bb. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
cc. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
dd. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
ee. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah.

3.3 Kerangka Regulasi Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023,

Kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
    a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
    b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
    c. RUU Tentang Badan Usaha
    d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
    e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
    f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
    g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
    h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
    i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
    j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
    l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
    m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
    n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
    o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

p. RUU tentang Indikasi Geografis
q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
s. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
    a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
    b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
    c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
    d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
    e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
    f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik
3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden
    a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)
    a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
    b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
    c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham
f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer
g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan
h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)
j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja
l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029
n. RPermenkum SOTK Poltek PIN
o. RPermenkum Statuta
p. Reviu PermenKum HAM 22/2022
q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum
r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
s. RPermenkum tentang UKI
t. RPermenkum tentang Pungli
u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan
v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
w. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
y. RPermenkum Tentang Audit Hukum
z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum
aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
bb. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
cc. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
dd. RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah
ee. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
ff. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
gg. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah
hh. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi,
ii. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
jj. jj. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
kk. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum
ll. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar
mm. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum
nn. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi
oo. Rpermenkum Tentang Tata Kelola Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Kegiatan serta Target tahun 2025 – 2029 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 indeks	3,90 indeks	3,91 indeks	3,92 indeks	3,93 indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 indeks	3, 22 indeks	3, 24 indeks	3, 26 indeks	3, 28 indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
5	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,5 Level	2,55 Level	2,6 Level	2,65 Level
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
9		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%

		di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum					
10	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan EvaluasiPelaksanaan Peraturan Daerah yangDitindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	89%	90%	91%	92%
12	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di Wilayah	50%	70%	75%	80%	85%
13	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	-	-	12%	13%	15%
14	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tabel. . Indikator Kinerja Kegiatan serta Target tahun 2025 – 2029 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.

BAB 5
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum telah disusun dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Kementerian Hukum juga telah menyusun pendelegasian kinerja (cascading) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan Nasional. Melalui proses ini, kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan selaras dengan indikator RPJMN. Penjenjangan kinerja juga telah dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga memastikan kesinambungan antar level perencanaan dan memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi peran Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan hukum Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis membutuhkan komitmen seluruh jajaran, koordinasi lintas unit, serta dukungan para pemangku kepentingan. Implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dimana dengan berlandaskan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Hukum berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi

instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Dengan tersusunnya dokumen ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan demi terwujudnya penyelenggaraan tugas dan layanan publik yang profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah ini.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I:
Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								**5.066.625,47**	**5.485.286,46**	**5.545.332,20**	**5.681.286,78**	**6.017.197,45**	
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI												**1. DITJEN PP; 2. DITJEN AHU; 3. DITJEN KI; 4. BPHN; 5. BPSDM Hukum**
	IKSS 1.1 Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks						
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum		0,83 Indeks	0,84 Indeks	0,85 Indeks	0,86 Indeks	0,87 Indeks						
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum		0,51 Indeks	0,52 Indeks	0,53 Indeks	0,54 Indeks	0,55 Indeks						
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi												**Seluruh Satuan Kerja**
	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks						
PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BB)								**53.677,08**	**51.276,21**	**59.814,46**	**66.085,50**	**74.292,33**	
	SP BB 1 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	IKP BB 1.1 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum		**0,94 Nilai**	**0,95 Nilai**	**0,96 Nilai**	**0,97 Nilai**	**0,98 Nilai**						
	SP BB 2 - Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan												**Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan**
	IKP BB 2.1 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		**3,26 Nilai**	**3,27 Nilai**	**3,28 Nilai**	**3,29 Nilai**	**3,30 Nilai**						
	SP BB 3 - Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	IKP BB 3.1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**						
KEGIATAN 7123	**FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**							**2.041,74**	**2.608,91**	**2.869,79**	**3.156,77**	**3.472,45**	**Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang Undangan**
	SK 7123.1 Terwujudnya Pembinaan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pusat											
	IKK 7123.1.1 Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas		75%	80%	85%	90%	95%						
	Output 1. Kebijakan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah		*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 2. Fasilitasi dan Pembinaan Substansi Perancangan Perda		*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*						
	Output 3. Pendampingan/Supervisi Fasilitasi Perancangan Perda		*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*	*8 Lembaga*						
	SK 7123.2 Meningkatnya kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	Pusat											
	IKK 7123.2.1 Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang naik jenjang		75%	77%	78%	79%	80%						
	Output 1. Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan		*200 Orang*	*200 Orang*	*200 Orang*	*200 Orang*	*200 Orang*						
	Output 2. Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*						
	Output 3. Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan		*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*						
KEGIATAN 7124	**LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**							**2,870.14**	**2,669.65**	**2,936.61**	**3,230.27**	**3,553.30**	**Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan**
	SK 7124.1 Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU dibawah UU melalui nonlitigasi	Pusat											
	IKK 7124.1.1 Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan		81%	82%	83%	84%	85%						
	IKK 7124.1.2 Persentase penyelesaian sengketa PUU dibawah UU melalui nonlitigasi		81%	82%	83%	84%	85%						
	Output 1. Bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan di Bidang KesraSosBudKumHam		*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan di Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian		*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*	*30 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 3. Penyelesaian sengketa PUU dibawah UU melalui nonlitigasi di Bidang KesraSosBudKumHam		*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 4. Penyelesaian sengketa PUU dibawah UU melalui nonlitigasi di Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian		*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*	*3 Rekomendasi Kebijakan*						
KEGIATAN 7125	**PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**							**8.483,50**	**5.614,34**	**9.796,05**	**10.775,15**	**11.853,22**	**Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan**
	SK 7125.1 Meningkatnya penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum sesuai perencanaan	Pusat											
	IKK 7125.1.1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	82%	84%	86%	88%						
	Output 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang		*3 RUU*	*3 RUU*	*3 RUU*	*3 RUU*	*3 RUU*						
	Output 2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Penyusunan DIM		*2 RUU*	*2 RUU*	*2 RUU*	*2 RUU*	*2 RUU*						
	Output 3. Rancangan Peraturan Pemerintah		*4 RPP*	*4 RPP*	*4 RPP*	*4 RPP*	*4 RPP*						
	Output 4. Rancangan Peraturan Presiden		*4 Rperpres*	*4 Rperpres*	*4 Rperpres*	*4 Rperpres*	*4 Rperpres*						
	Output 5. Rancangan Peraturan Menteri		*4 Permen*	*4 Permen*	*4 Permen*	*4 Permen*	*4 Permen*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 6. Konsepsi RPUU		*6 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 7. RUU KUH Acara Perdata		*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 8. RUU Kepailitan & PKPU		*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 9. RUU Jaminan Benda Bergerak		*1 RUU*										
	Output 10. RUU Narkotika dan Psikotropika		*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 11. RUU Desain Industri				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 12. RUU Hukum Perdata Internasional			*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 13. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor .1.2 Tahun 20.1.1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 14. RUU tentang Bantuan Hukum				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 15. RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 16. RUU Badan Usaha				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 17. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi				*1 RUU*	*1 RUU*	*1 RUU*						
	Output 18. RPP Pelaksanaan UU KUHP		*3 RPP*										
	Output 19. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan The Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (HCCH 1965 Service Convention)			*1 Rperpres*	*1 Rperpres*	*1 Rperpres*	*1 Rperpres*						
KEGIATAN 7126	**PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**							**2.130,27**	**2.813,03**	**3.094,33**	**3.403,76**	**3.744,13**	**Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan**
	SK 7126.1 Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan	Pusat											
	IKK 7126.1.1 Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7126.1.2 Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan		85%	86%	88%	89%	90%						
	IKK 7126.1.3 Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang Dipublikasikan		85%	86%	87%	88%	89%						
	IKK 7126.1.4 Tingkat ketersediaan *(Availability Time)* sistem informasi PUU		91%	92%	93%	94%	95%						
	Output 1. Pengundangan PUU		*1 Dokumen*	*1000 Dokumen*	*1000 Dokumen*	*1000 Dokumen*	*1000 Dokumen*						
	Output 2. Terjemahan Peraturan Perundang-undangan		*1 Dokumen*	*30 Dokumen*	*30 Dokumen*	*30 Dokumen*	*30 Dokumen*						
	Output 3. Publikasi PUU		*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
	Output 4. Jurnal Legislasi Indonesia		*1 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*						
	Output 5. Data dan Informasi PUU		*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
KEGIATAN 7127	**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG POLHUKHANKAMPEMIMIPAS DAN KOMDIGI**							**2.570,01**	**3.212,35**	**3.533,59**	**3.886,95**	**4.275,64**	**Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I**
	SK 7127.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan komdigi sesuai ketentuan PUU	Pusat											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7127.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU		81%	82%	83%	84%	85%						
	Output 1. Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi		*80 Rekomendasi Kebijakan*	*100 Rekomendasi Kebijakan*	*105 Rekomendasi Kebijakan*	*110 Rekomendasi Kebijakan*	*115 Rekomendasi Kebijakan*						
KEGIATAN 7128	**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**1.564,79**	**3.944,32**	**4.338,75**	**4.772,62**	**5.249,89**	**Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II**
	SK 7128.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan PUU	Pusat											
	IKK 7127.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan komdigi yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU		81%	82%	83%	84%	85%						
	Output 1. Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi		*80 Rekomendasi Kebijakan*	*100 Rekomendasi Kebijakan*	*105 Rekomendasi Kebijakan*	*110 Rekomendasi Kebijakan*	*115 Rekomendasi Kebijakan*						
KEGIATAN 7833	**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN**							**735,21**	**2.553,84**	**2.809,23**	**3.090,15**	**3.399,16**	**Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III**
	SK 7833.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan PUU	Pusat											
	IKK 7833.1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU		81%	82%	83%	84%	85%						
	Output 1. Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perekonomian		*80 Rekomendasi Kebijakan*	*100 Rekomendasi Kebijakan*	*105 Rekomendasi Kebijakan*	*110 Rekomendasi Kebijakan*	*115 Rekomendasi Kebijakan*						
KEGIATAN 7834	**PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**							**1.107,56**	**3.564,35**	**1.807,72**	**1.988,49**	**2.187,34**	**Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan**
	SK 7834.1 Terwujudnya Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Berkualitas	Pusat											
	IKK 7834.1.1 Indeks Perencanaan Peraturan Perundang-undangan		3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,15 Indeks						
	Output 1. Rekomendasi kebijakan Program Legislasi		*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan PP dan Perpres		*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 3. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Naskah Akademik RUU		*5 Rekomendasi Kebijakan*	*4 Rekomendasi Kebijakan*	*4 Rekomendasi Kebijakan*	*4 Rekomendasi Kebijakan*	*4 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 4. Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Naskah Akademik		*2 Rekomendasi Kebijakan*	*5 Rekomendasi Kebijakan*	*5 Rekomendasi Kebijakan*	*5 Rekomendasi Kebijakan*	*5 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 5. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		*1 Lembaga*	*10 Lembaga*	*10 Lembaga*	*10 Lembaga*	*10 Lembaga*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 6. Draft Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor .1.2 Tahun 20.1.1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan			*1 Rekomendasi Kebijakan*									
	Output 7. Draft Naskah Akademik RUU tentang Bantuan Hukum			*1 Rekomendasi Kebijakan*									
	Output 8. Draft Naskah Akademik RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa			*1 Rekomendasi Kebijakan*									
KEGIATAN 7129	**PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH**							**19.278,87**	**13.060,86**	**14.366,91**	**15.803,56**	**17.383,87**	**Kantor Wilayah**
	SK 7129.1 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Daerah											
	IKK 7129.1.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	IKK 7129.1.2 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*						
	Output 2. Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah		*1067 Rekomendasi Kebijakan*	*3707 Rekomendasi Kebijakan*	*3777 Rekomendasi Kebijakan*	*3872 Rekomendasi Kebijakan*	*3932 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 3. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
	Output 4. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		*626 Orang*										
KEGIATAN 7131	**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**							**3.756,00**	**3.215,72**	**4.638,86**	**4.126,63**	**4.951,96**	**Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**
	SK 7131.1 Meningkatnya Kualitas Analis Hukum	Pusat											
	IKK 7131.1.1 Persentase Analis Hukum yang Naik Jenjang		5%	6%	7%	8%	8%						
	Output 1. Standardisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum		*500 Orang*	*500 Orang*	*550 Orang*	*600 Orang*	*650 Orang*						
	SK 7131.3 Meningkatnya tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan	Pusat											
	IKK 7131.3.1 Persentase hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L/D		72%	73%	74%	75%	76%						
	Output 1. Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap PUU		*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Indeks Pembangunan Hukum		*1 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 3. Pedoman Evaluasi Peraturan dan Perundang - Undangan			*1 NSPK*									
	Output 4. Koordinasi Piloting Analisis dan Evalusi Regulasi Tematik				*1 Kegiatan*								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 5. Penyusunan Permen Peraturan Pelaksanaan Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum		*1 Permen*										
KEGIATAN 7132	**PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**							**4.632,36**	**5.780,67**	**6.936,81**	**8.628,17**	**10.353,00**	**Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional**
	SK 7132.1 Meningkatnya Kepatuhan K/L/D dalam Pelaksanaan Hukum	**Pusat**											
	IKK 71321.1 Persentase Kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum			75%	80%	85%	90%						
	Output 1. Pengawasan Kepatuhan Hukum K/L/D			*300 Lembaga*	*350 Lembaga*	*400 Lembaga*	*450 Lembaga*						
	SK 7132.2 Terwujudnya Reformasi Hukum di Lingkungan K/L/D	**Pusat**											
	IKK 7132.2.1 Persentase K/L/D yang Berhasil Melakukan Reformasi Hukum		0%	75%	76%	77%	78%						
	Output 1. Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Hukum K/L/D				*300 Lembaga*	*300 Lembaga*	*300 Lembaga*						
	Output 2. Informasi Indeks Reformasi Hukum			*1 Dokumen*									
	SK 7132.3 Meningkatnya K/L yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang	**Pusat**											
	- IKK 7132.3.1 Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.		0	75%	76%	77%	78%						
	Output 1. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional		*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Informasi Indeks Pembangunan Hukum		*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
	Output 3. Rekomendasi Program Legislasi		*1 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 4. Rekomendasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden		*2 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 5. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang		*3 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 6. Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik		*7 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 7. Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan Peninjauan UU			*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 8.. Pedoman di bidang Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional		*1 NSPK*										
	Output 9. Fasilitasi Perencanaan Hukum Nasional		*10 Lembaga*										
KEGIATAN 7133	**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI WILAYAH**							**4.506,63**	**2.238,19**	**2.685,82**	**3.222,99**	**3.867,58**	**Kantor Wilayah**
	SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	**Wilayah**											
	IKK 7133.1.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		*33 Rekomendasi Kebijakan*	*33 Rekomendasi Kebijakan*	*33 Rekomendasi Kebijakan*	*33 Rekomendasi Kebijakan*	*33 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		*33 Lembaga*										
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)								**750.640,48**	**719.360,48**	**707.719,26**	**748.269,45**	**809.681,61**	
	SP BF 1 - Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional												**Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum**
	IKP BF 1.1 Indeks Penegakan Hukum AHU		**3,50 Indeks**	**3,53 Indeks**	**3,55 Indeks**	**3,58 Imdeks**	**3,60 Indeks**						
	SP BF 2 - Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU												**Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum**
	IKP BF 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU		**3,71 Indeks**	**3,72 Indeks**	**3,73 Indeks**	**3,74 Indeks**	**3,75 Indeks**						
	SP BF 3 - Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan												**Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum**
	IKP BF 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan		**3,10 Indeks**	**3,15 Indeks**	**3,20 Indeks**	**3,25 Indeks**	**3,30 Indeks**						
	SP BF 4 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
	IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual		**3,36 Indeks**	**3,36 Indeks**	**3,37 Indeks**	**3,38 Indeks**	**3,40 Indeks**						
	SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
	IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual		**3,05 Indeks**	**3,06 Indeks**	**3,07 Indeks**	**3,08 Indeks**	**3,09 Indeks**						
	SP BF 6 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	IKP BF 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional		**3,68 Indeks**	**3,71 Indeks**	**3,74 Indeks**	**3,77 Indeks**	**3,77 Indeks**						
	SP BF 7 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
	IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		**2,2 Indeks**	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**						
	SP BF 8 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	IKP BF 8.1 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat		**0,72 Nilai**	**0,73 Nilai**	**0,74 Nilai**	**0,75 Nilai**	**0,76 Nilai**						
KEGIATAN 7106	**ADMINISTRASI OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL**							**46.771,82**	**14.487,82**	**21.537,40**	**17.530,26**	**19.283,29**	**Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**
	SK 7106.1 Terlaksananya Tindak Lanjut Pembentukan Perjanjian dan/atau Permintaan MLA dan Ekstradisi sesuai Kewenangan Otoritas Pusat	**Pusat**											
	IKK 7106.1.1 Persentase Pembentukan Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti		97%	97,5%	98%	98,5%	99%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7106.1.2 Persentase Permintaan MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti		97%	97,5%	98%	98,5%	99%						
	Output 1. Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Bidang Otoritas Pusat		*5 Kesepakatan*	*5 Kesepakatan*	*5 Kesepakatan*	*5 Kesepakatan*	*5 Kesepakatan*						
	Output 2. Layanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional kepada Lembaga		*4 Lembaga*	*4 Lembaga*	*4 Lembaga*	*4 Lembaga*	*4 Lembaga*						
	SK 7106.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	**Pusat**											
	IKK 7106.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan		95%	96%	97%	98%	99%						
	KK 7106.2.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan		97,5	98%	98,5%	99%	99,5%						
	Output 1. Layanan Atase Hukum di Luar Negeri		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Legalisasi Apostille		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Penanganan Perkara di Pengadilan Asing dan Forum Internasional		*2 Perkara*	*2 Perkara*	*2 Perkara*	*2 Perkara*	*2 Perkara*						
	Output 4. Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) Konvensi HCCH 1965 Service Convention		*1 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 5. Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) HCCH 1970 Taking Evidence Convention				*1 Rekomendasi Kebijakan*								
KEGIATAN 7107	**ADMINISTRASI HUKUM PERDATA**							**24.662,58**	**12.331,29**	**13.531,20**	**14.851,11**	**16.303,00**	**Direktorat Perdata**
	SK 7107.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	**Pusat**											
	IKK 7107.1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan		95%	96%	97%	98%	99%						
	IKK 7107.1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang Diselesaikan		97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%						
	Output 1. Layanan Hukum Perdata		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	Output 2. Layanan Profesi Keperdataan		*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*						
	Output 3. Layanan Dukungan Administrasi di Bidang Keperdataan		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	Output 4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga di Bidang Administrasi Hukum Perdata		*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
	Output 5. Penanganan Perkara Keperdataan		*15 Perkara*	*15 Perkara*	*15 Perkara*	*15 Perkara*	*15 Perkara*						
	Output 6. Layanan Administrasi Jaminan Fidusia dan Ijin Jual Boedoel		*2 Layanan*										
	Output 7. Layanan Hukum Perdata Umum, Harta Peninggalan dan Kurator Negara, serta Kenotariatan		*3 Layanan*										
	SK 7107.2 Meningkatnya Kinerja Kurator Keperdataan	**Pusat**											
	IKK 7107.2.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja “Baik”		90%	91%	92%	93%	94%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan		*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*						
	SK 7107.3 Meningkatnya Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	**Pusat**											
	IKK 7107.3.1 Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia		83%	84%	85%	86%	87%						
	IKK 7107.3.2 Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus		81%	82%	83%	84%	85%						
	Output 1. Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia terkait Kemudahan Berusaha		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Pendaftaran Kurator dan Pengurus terkait Kemudahan Berusaha		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7108	**ADMINISTRASI HUKUM PIDANA**							**11.235,78**	**5.617,89**	**6.179,68**	**6.797,65**	**7.477,41**	**Direktorat Pidana**
	SK 7108.1 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7108.1.1 Persentase Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan		95%	96%	97%	98%	99%						
	Output 1. Layanan Pemberian Keterangan Ahli dan PPNS		*6 Lembaga*										
	Output 2. Layanan Pemberian Keterangan Ahli			*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
	SK 7108.2 Terselenggaranya Penempatan Sumber Daya Manusia PPNS Sesuai Bidangnya	**Pusat**											
	IKK 7108.2.1 Persentase PPNS yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan		85%	86%	87%	88%	89%						
	Output 1. Administrasi PPNS			*25 Lembaga*	*25 Lembaga*	*25 Lembaga*	*25 Lembaga*						
	SK 7108.3 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	**Pusat**											
	IKK 7108.3.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan		95%	96%	97%	98%	99%						
	IKK 7108.3.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan		97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%						
	Output 1. Layanan Permohonan Grasi, Pendapat Hukum Pidana, dan Pengelolaan Data Sidik Jari		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
KEGIATAN 7109	**ADMINISTRASI HUKUM TATA NEGARA**							**13.725,14**	**6.862,57**	**7.548,83**	**8.303,71**	**9.134,08**	**Direktorat Tata Negara**
	SK 7109.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	**Pusat**											
	IKK 7109.1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan		95%	96%	97%	98%	99%						
	IKK 7109.1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang Diselesaikan		97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%						
	Output 1. Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan		*2700 Orang*	*2700 Orang*	*2700 Orang*	*2700 Orang*	*2700 Orang*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 2. Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Penanganan Perkara Badan Hukum Partai Politik		*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*						
KEGIATAN 7110	**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH**							**110.770,52**	**73.059,60**	**80.297,71**	**88.256,23**	**97.007,05**	**1. Kantor Wilayah; 2. Balai Harta Peninggalan**
	SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks						
	Output 1. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*	*132 Layanan*						
	Output 2. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		*33 Dokumen*										
	Output 3. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
	Output 4. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*	*30 Perkara*						
	SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	**WIlayah**											
	IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%						
	Output 1. Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		*273 Lembaga*	*275 Lembaga*	*275 Lembaga*	*275 Lembaga*	*275 Lembaga*						
	SK 7110.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	**Wilayah**											
	IKK 7110.3.1 Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%						
	Output 1. Layanan Balai Harta Peninggalan		*25 Layanan*	*25 Layanan*	*25 Layanan*	*25 Layanan*	*25 Layanan*						
KEGIATAN 7111	**PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI ADMINISTRASI HUKUM UMUM**							**213.129,49**	**224.309,85**	**166.620,00**	**172.630,00**	**191.940,00**	**Direktorat Teknologi Informasi**
	SK 7111.1 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	**Pusat**											
	IKK 7111.1.1 *Service Level Agreement* (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen AHU		85%	87%	89%	93%	95%						
	IKK 7111.1.2 *Mean Time to Respon*d (MTTR) terhadap Serangan Siber ke Ditjen AHU		1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam						
	Output 1. Rekomendasi Kebijakan TI Ditjen AHU			*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Layanan Data dan Informasi Ditjen AHU		*40 Data*										
	Output 3. Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Publik			*40 Data*	*40 Data*	*40 Data*	*40 Data*						
	Output 4. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Administrasi Hukum Umum		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 5. Layanan Pemeliharaan Sarana TIK Bidang AHU		*32 Unit*	*32 Unit*	*32 Unit*	*32 Unit*	*32 Unit*						
	Output 6. Data Center Ditjen AHU		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 7. Layanan Pemeliharaan Prasarana TIK Bidang Administrasi Hukum Umum		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 8. Sistem Informasi Administrasi Hukum Umum		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*						
	Output 9. Sarana Sistem Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang AHU		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 10. Layanan Pemeliharaan Sistem Keamanan TIK Ditjen AHU		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
KEGIATAN 7112	**ADMINISTRASI BADAN USAHA**							**18.703,38**	**9.351,69**	**10.286,86**	**11.815,55**	**12.447,10**	**Direktorat Badan Usaha**
	SK 7112.1 Dimanfaatkannya Data dan Informasi Badan Usaha dalam Penegakan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7112.1.1 Persentase Data dan Informasi Badan Usaha yang Dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) Berdasarkan Kerja Sama		0%	92%	94%	96%	98%						
	Output 1. Data dan Informasi Badan Usaha			*500 Data*	*500 Data*	*500 Data*	*500 Data*						
	SK 7112.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha	**Pusat**											
	IKK 7112.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan		95%	96%	97%	98%	99%						
	IKK 7112.2.2 Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang Diselesaikan		97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%						
	Output 1. Layanan Administrasi Badan Usaha		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Beneficial Ownership					*1 Rekomendasi Kebijakan*							
	Output 3. Penanganan Permasalahan Badan Usaha		*70 Perkara*										
	Output 4. Penanganan Perkara Badan Usaha			*70 Perkara*	*70 Perkara*	*70 Perkara*	*70 Perkara*						
	SK 7112.3 Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha	**Pusat**											
	IKK 7112.3.1 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas		86%	87%	88%	89%	90%						
	IKK 7112.3.2 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan		85%	86%	87%	88%	89%						
	Output 1. Layanan Pendirian Perseroan Terbatas terkait Kemudahan Berusaha		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Pendirian Perseroan Perorangan terkait Kemudahan Berusaha		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7115	**PENYELENGGARAAN SISTEM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**							**14.782,76**	**14.619,68**	**15.350,66**	**16.118,19**	**16.924,10**	**Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri**
	SK 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	**Pusat**											
	IKK 7115.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	IKK 7115.1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait		70%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7115.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri		-	80%	80%	80%	80%						
	IKK 7115.1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)		-	75%	75%	75%	75%						
	Output 1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal		*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*						
	Output 2. Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif			*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
	Output 3. Pembinaaan Lembaga Manajemen Kolektif		*1 Lembaga*										
	Output 4. Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri		*300 Layanan*										
	Output 5. Layanan Advokasi Hukum terkait Hak Cipta , Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal			*300 Layanan*	*300 Layanan*	*300 Layanan*	*300 Layanan*						
	SK 7115.2 Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta	**Pusat**											
	IKK 7115.2.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta		20%	20%	20%	20%	20%						
	Output 1. Layanan Hak Cipta		*120000 Layanan*	*132000 Layanan*	*132000 Layanan*	*132000 Layanan*	*132000 Layanan*						
	SK 7115.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri	**Pusat**											
	IKK 7115.3.1 Persentase Desain Industri terdaftar		50%	75%	75%	75%	75%						
	Output 1. Layanan Desain Industri		*5500 Layanan*	*6050 Layanan*	*6050 Layanan*	*6050 Layanan*	*6050 Layanan*						
	SK 7115.4 Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	**Pusat**											
	IKK 711541 Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal		30%	25%	25%	25%	25%						
	Output 1. Layanan Kekayaan Intelektual Komunal		*1200 Layanan*	*200 Layanan*	*200 Layanan*	*200 Layanan*	*200 Layanan*						
	SK 7115.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri	**Pusat**											
	IKK 71155.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”		0%	90%	90%	90%	90%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman Bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7116	**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**							**30.895,63**	**39.162,38**	**41.120,50**	**43.176,52**	**45.335,35**	**Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi**
	SK 7116.1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7116.1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual		2 Indeks	3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks						
	Output 1. Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual		*27 Kesepakatan*	*30 Kesepakatan*	*30 Kesepakatan*	*30 Kesepakatan*	*30 Kesepakatan*						
	Output 2. Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual		*35 Kesepakatan*	*37 Kesepakatan*	*37 Kesepakatan*	*37 Kesepakatan*	*37 Kesepakatan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7116.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7116.2.1 Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks						
	Output 1. Diseminasi Kekayaan Intelektual		*10000 Orang*										
	Output 2. Edukasi Kekayaan Intelektual		*10000 Orang*										
	Output 3. Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual		*1000 Orang*										
	Output 4. Promosi Kekayaan Intelektual			*68 Promosi*	*68 Promosi*	*68 Promosi*	*68 Promosi*						
	Output 5. Layanan Edukasi KI			*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*						
	Output 6. Layanan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Konsultan KI			*20 Layanan*	*20 Layanan*	*20 Layanan*	*20 Layanan*						
	Output 7. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual		*5 NSPK*										
	Output 8. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual			*4 NSPK*	*4 NSPK*	*4 NSPK*	*4 NSPK*						
	SK 7116.3 Meningkatnya kinerja Analis Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7116.3.1 Persentase Analis KI dengan kinerja “Baik”		-	80%	82%	84%	86%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman bagi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual			*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	SK 7116.4 Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	- IKK 7116.4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat			60%	65%	70%	755						
	Output 1. Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual			*30 Layanan*	*30 Layanan*	*30 Layanan*	*30 Layanan*						
KEGIATAN 7117	**PENYELENGGARAAN SISTEM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**							**17.545,10**	**26.663,74**	**28.433,51**	**29.855,19**	**31,347.95**	**Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**
	SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	**Pusat**											
	IKK 7117.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan.		90%	90%	90%	90%	90%						
	IKK 7117.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Merek		90%	90%	90%	90%	90%						
	IKK 7117.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis		90%	92%	94%	96%	98%						
	Output 1. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis		*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*						
	Output 2. Layanan Advokasi Hukum Terkait Merek			*245 Layanan*	*245 Layanan*	*245 Layanan*	*245 Layanan*						
	Output 3. Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis		*245 Layanan*										
	Output 4. Layanan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis			*88 Sidang*	*88 Sidang*	*88 Sidang*	*88 Sidang*						
	Output 5. Keputusan atas Permohonan Banding Merek		*540 Layanan*										
	Output 6. Pengawasan dan Pengendalian Produk Indikasi Geografis			*30 Produk*	*30 Produk*	*30 Produk*	*30 Produk*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7117.2 Meningkatnya Pendaftaran Merek	**Pusat**											
	IKK 7117.2.1 Persentase Merek Terdaftar		70%	71%	72%	73%	74%						
	Output 1. Layanan Merek		*71708 Layanan*	*71708 Layanan*	*71708 Layanan*	*71708 Layanan*	*71708 Layanan*						
	SK 7117.3 Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis	**Pusat**											
	IKK 7117.3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar		50%	53%	55%	58%	60%						
	Output 1. Layanan Indikasi Geografis		*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*						
	SK 7117.4 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	**Pusat**											
	IKK 7117.4.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"		82%	84%	86%	88%	90%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Pemahaman Bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7118	**PENYELENGGARAAN SISTEM PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**							**26.744,98**	**26.783,10**	**28.122,25**	**29.528,36**	**31.004,78**	**Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang**
	SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	**Pusat**											
	IKK 7118.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	IKK 7118.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Paten		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7118.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		-	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7118.1.4 Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang		91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%						
	Output 1. Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*	*3 NSPK*						
	Output 2. Layanan Advokasi Hukum Terkait Paten, DTLST dan Rahasia Dagang		*200 Layanan*	*211 Layanan*	*211 Layanan*	*211 Layanan*	*211 Layanan*						
	Output 3. Layanan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding Paten			*25 Sidang*	*25 Sidang*	*25 Sidang*	*25 Sidang*						
	Output 4. Keputusan atas Permohonan Banding Paten		*25 Layanan*										
	SK 7118.2 Meningkatnya Pendaftaran Paten	**Pusat**											
	IKK 7118.2.1 Persentase Paten yang Diberi (*granted*)		35%	36%	37%	38%	39%						
	Output 1. Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		*13000 Layanan*										
	Output 2. Layanan Paten			*13520 Layanan*	*13520 Layanan*	*13520 Layanan*	*13520 Layanan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7118.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	**Pusat**											
	IKK 7118.3.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			*7 Layanan*	*7 Layanan*	*7 Layanan*	*7 Layanan*						
	SK 7118.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	**Pusat**											
	IKK 7118.4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang		10%	10,5%	11%	11,5%	12%						
	Output 1. Layanan Pencatatan perjanjian Rahasia Dagang			*24 Layanan*	*24 Layanan*	*24 Layanan*	*24 Layanan*						
	SK 7118.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten												
	IKK 7118.5.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"		82%	84%	86%	88%	90%						
	Output 1. Layanan Peningkatan pemahaman bagi jabatan fungsional Pemeriksa Paten			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7119	**PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**							**7.985,66**	**10.702,46**	**11.237,58**	**11.799,46**	**12.389,44**	**Direktorat Penegakan Hukum**
	SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7119.1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual		76%	76%	79%	79%	79%						
	IKK 7119.1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani		52%	60%	60%	60%	60%						
	Output 1. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI		*2 NSPK*										
	Output 2. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual			*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*	*2 NSPK*						
	Output 3. Layanan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		*60 Layanan*	*60 Layanan*	*60 Layanan*	*60 Layanan*	*60 Layanan*						
	Output 4. Layanan Mediasi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual			*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*	*18 Layanan*						
	Output 5. Layanan Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		*25 Perkara*	*32 Perkara*	*32 Perkara*	*32 Perkara*	*32 Perkara*						
	Output 6. Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI		*18 Perkara*										
	Output 7. Data Pelanggaran KI			*8 Data*	*8 Data*	*8 Data*	*8 Data*						
	Output 8. Data Barang Bukti Hasil Pelanggaran KI			*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
KEGIATAN 7120	**PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**							**53.488,15**	**90.872,80**	**95.416,44**	**100.187,26**	**105.196,62**	**Direktorat Teknologi Informasi**
	SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7120.1.1 *Service Level Agreement* (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual		98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7120.1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia		98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%						
	IKK 7120.1.3 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual		1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam						
	Output 1. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi			*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*	*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		*5 NSPK*	*5 NSPK*	*5 NSPK*	*5 NSPK*	*5 NSPK*						
	Output 3. Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual		*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*	*1 Data*						
	Output 4. Layanan Pemeliharaan Sarana TIK Bidang Kekayaan Intelektual			*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 5. Data Center Kekayaan Intelektual			*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*						
	Output 6. Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual		*1 Titik/ Lokasi*										
	Output 7. Layanan Pemeliharaan Data Center Kekayaan Intelektual			*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*	*1 Titik/ Lokasi*						
	Output 8. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*						
	Output 9. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
KEGIATAN 7121	**PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH**							**74.543,34**	**77.884,15**	**81.588.62**	**84.842,02**	**88.959,13**	**Kantor Wilayah**
	SK 7121.1 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Output 1. Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 2. Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		*10348 orang*										
	SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	**Wilayah**											
	IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%						
	Output 1. Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah			*66 data*	*66 data*	*66 data*	*66 data*						
	Output 2. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		*96 Layanan*										
	SK 7121.3 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7121.3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level						
	Output 1. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 2. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		*33700 orang*										
	Output 3. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		*4950 orang*										
	Output 4. Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			*6400 Orang*	*6400 Orang*	*6400 Orang*	*6400 Orang*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 7134	**LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JDIHN**							**4.035,69**	**4.122,00**	**4.950,41**	**5.936,49**	**7.143,78**	**Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**
	SK 7134.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas	**Pusat**											
	IKK 7134.1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan		0%	85%	87%	90%	90%						
	IKK 71341.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia		35%	60%	87%	90%	90%						
	Output 1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Hukum			*632 Lembaga*	*650 Lembaga*	*675 Lembaga*	*700 Lembaga*						
	Output 2. Data dan Informasi Hukum dalam Portal Pusat JDIHN		*100000 Data*	*125000 Data*	*150000 Data*	*175000 Data*	*200000 Data*						
	SK 7134.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN	**Pusat**											
	IKK 7134.2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Pengawasan dan Pengendalian JDIHN		*632 Lembaga*	*650 Lembaga*	*675 Lembaga*	*700 Lembaga*	*725 Lembaga*						
	Output 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang JDIHN		*1 Rperpres*										
	Output 3. Pedoman Pengelolaan TI BPHN		*1 NSPK*										
KEGIATAN 7135	**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**							**7.442,29**	**7.264,69**	**6.317,63**	**7.581,15**	**9.597,39**	**Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum**
	SK 7135.1 Meningkatnya Layanan penyuluhan hukum nasional	**Pusat**											
	IKK 7135.1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan		83%	85%	87%	90%	90%						
	Output 1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Penyuluhan Hukum			*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*	*33 Lembaga*						
	SK 7135.2 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7135.2.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan		83%	85%	87%	90%	90%						
	Output 1. Pengawasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum		*810 Lembaga*	*810 Lembaga*	*810 Lembaga*	*890 Lembaga*	*891 Lembaga*						
	Output 2. Fasilitasi dan Pembinaan Panita Pengawas Daerah			*33 Lembaga*									
	SK 7135.3 Terbangunnya Budaya Hukum Masyarakat	**Pusat**											
	IKK 7135.3.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum		3,08 Indeks	3,09 Indeks	3,10 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks						
	IKK 7135.3.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar			84%	86%	88%	90%						
	Output 1. Dokumen Peta Permasalahan Hukum		*1 Dokumen*		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Informasi Peta Permasalahan Hukum			*1 Dokumen*									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 3. Penyusunan Roadmap Penguatan Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat						*1 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 4. Pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan			*1764 Lembaga*	*2646 Lembaga*	*3969 Lembaga*	*5954 Lembaga*						
	SK 7135.4 Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum	**Pusat**											
	IKK 7135.4.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang		5%	6%	7%	8%	8%						
	Output 1. Standardisasi dan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional		*500 Orang*	*600 Orang*	*700 Orang*	*800 Orang*	*800 Orang*						
	Output 2. Pengelolaan Desa/Kelurahan sadar hukum		*5 Kegiatan*										
	Output 3. Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards		*300 Orang*										
	Output 4. Penyuluhan Hukum		*150 Kelompok Masyarakat*										
KEGIATAN 7136	**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH**							**74.178,19**	**75.264,79**	**89.179,99**	**99.060,32**	**108.191,15**	**Kantor Wilayah**
	SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88%	89%	90%	91%	92%						
	Output 1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		*6263 Orang*	*6271 Orang*	*7817 Orang*	*9305 Orang*	*9305 Orang*						
	Output 2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		*839 Kegiatan*	*843 Kegiatan*	*1189 Kegiatan*	*1966 Kegiatan*	*1966 Kegiatan*						
	Output 3. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		*777 Lembaga*	*777 Lembaga*	*777 Lembaga*	*855 Lembaga*	*940 Lembaga*						
	Output 4. Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum				*777 Lembaga*								
	SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	**Wilayah**											
	IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%						
	Output 1. Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		*308 Lembaga*	*308 Lembaga*	*350 Lembaga*	*375 Lembaga*	*400 Lembaga*						
	SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7136.3.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan				12%	13%	15%						
	Output 1. Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan				*21036 Lembaga*	*24194 Lembaga*	*27822 Lembaga*						
	Output 2. Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan			*33 Lembaga*									
	Output 3. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		*66 Kegiatan*	*9900 Orang*	*11550 Orang*	*13200 Orang*	*14850 Orang*						
	Output 4. Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah		*33 Data*	*33 Data*	*33 Data*	*33 Data*	*33 Data*						
	Output 5. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		*315 Kelompok Masyarakat*										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 6. Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		*33 Laporan*										
	Output 7. Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		*33 Laporan*										
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)								**4.262.307,91**	**4.714.649,77**	**4.777.798,49**	**4.866.931,82**	**5.133.223,51**	
	SP WA 1 - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum												**1. SETJEN; 2. ITJEN; 3. BSK; 4. BPSDM; 5. SESDIT/BADAN.**
	IKP WA 1.1 - Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		**87,38 Indeks**	**87,40 Indeks**	**87,42 Indeks**	**87,44 Indeks**	**87,46 Indeks**						
	SP WA 2 - Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum												**Badan Strategi Kebijakan**
	IKP WA 2.1 - Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		**65 Indeks**	**67 Indeks**	**69 Indeks**	**71 Indeks**	**73 Indeks**						
	SP WA 3 - Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum												**Inspektorat Jenderal**
	IKP WA 3.1 - Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum		**3,20 (Level 3)**	**3,25 (Level 3)**	**3,30 (Level 3)**	**3,35 (Level 3)**	**3,40 (Level 3)**						
	SP WA 4 - Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum												**BPSDM**
	IKP WA 4.1 Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum		**6,5 Indeks**	**6,6 Indeks**	**6,7 Indeks**	**6,8 Indeks**	**6,9 Indeks**						
	SP WA 5 - Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum												**BPSDM**
	IKP WA 5.1 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum		**3,48 Indeks**	**3,52 Indeks**	**3,56 Indeks**	**3,60 Indeks**	**3,64 Indeks**						
KEGIATAN 7092	**HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**							**12.344,11**	**12.457,31**	**13.080,18**	**13.734,18**	**14.420,89**	**Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama**
	SK 7092.1 Terwujudnya Reformasi Hukum Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7092.1.1 Indeks Reformasi Hukum Kemenkum		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Output 1. Layanan Hukum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Bantuan Hukum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7092.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	**Pusat**											
	IKK 7092.2.1 Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Pembinaan dan Pelaksanaan Humas, Hukum, dan Kerja Sama		*7 Laporan*										
	Output 2. Pembinaan dan Pelaksanaan Hukum, Komunikasi Publik , dan Kerja Sama			*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
	Output 3. Kerja Sama		*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*						
	SK 7092.3 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum	**Pusat**											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7092.3.1 Indeks citra positif Kementerian Hukum		80 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	82 Indeks						
	Output 1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*						
KEGIATAN 7093	**PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM**							**48.627,27**	**32.200,00**	**33.810,00**	**35.498,20**	**37.269,20**	**Biro Sumber Daya Manusia**
	SK 7093.1 Terinternalisasinya Budaya ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7093.1.1 Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum		77,2% (Kategori A, Sehat)	80 % (kategori A,Sehat)	82% (kategori A,Sehat)	85% (kategori A,Sehat)	88% (kategori A,Sehat)						
	IKK 7093.1.2 Indeks Sistem Merit Kementerian Hukum		373,5 Indeks	373,5 Indeks	375 Indeks	375 Indeks	378 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		*1 Layanan*										
	Output 2. Layanan Manajemen SDM		*5000 Orang*	*7327 Orang*	*7327 Orang*	*7327 Orang*	*7327 Orang*						
KEGIATAN 7094	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN HUKUM**							**17.367,64**	**18.236,02**	**19.147,82**	**20.105,21**	**21.110,47**	**Biro Keuangan**
	SK 7094.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7094.1.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum		WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)						
	IKK 7094.1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		96 Nilai	96,5 Nilai	97 Nilai	97,5 Nilai	98 Nilai						
	IKK 7094.1.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat Jenderal		*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Manajemen Keuangan tingkat Kementerian		*14 Dokumen*	*14 Dokumen*	*14 Dokumen*	*14 Dokumen*	*14 Dokumen*						
KEGIATAN 7095	**PERENCANAAN DAN ORGANISASI**							**20.838,19**	**23.073,54**	**24.227,22**	**25.438,57**	**26.710,50**	**Biro Perencanaan dan Organisasi**
	SK 7095.1 Meningkatnya implementasi SAKIP Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7095.1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum		78,32 (BB)	78,52 (BB)	78,72 (BB)	78,92 (BB)	79,12 (BB)						
	Output 1. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum		*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Manajemen Kinerja Sekretariat Jenderal		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Dokumen*										
	SK 7095.2 Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan *Agile*	**Pusat**											
	IKK 7095.2.1 Nilai evaluasi organisasi		1,60 (C)	1,85 (C)	2,15 (C+)	2,50 (B)	2,99 (B)						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7095.2.2 Indeks Evaluasi Organisasi		4,52 Indeks	4,60 Indeks	4,70 Indeks	4,80 Indeks	4,90 Indeks						
	IKK 7095.2.3 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum		3,16 Nilai	3,24 Nilai	3,32 Nilai	3,40 Nilai	3,48 Nilai						
	IKK 7095.2.4 Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		82,50 Opini	83,00 Opini	84,00 Opini	85,00 Opini	86,00 Opini						
	Output 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*						
	SK 7095.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7095.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum		90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai	92,5 Nilai						
	IKK 7095.3.2 Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum		91 Indeks	91,5 Indeks	92 Indeks	92,5 Indeks	93 Indeks						
	Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Sekretariat Jenderal		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Penyusunan Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran		*2 Dokumen*										
	Output 4. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum			*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	SK 7095.4 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7095.4.1 Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	IKK 7095.4.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum			*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Reformasi Kinerja		*3 Dokumen*										
KEGIATAN 7096	**PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN HUKUM**							**14.649,76**	**15.382,25**	**16.151,36**	**16.958,93**	**17.806,87**	**Biro Barang Milik Negara**
	SK 7096.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN	**Pusat**											
	IKK 7096.1.1 Indeks Pengelolaan Aset		3,6 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks						
	IKK 7096.1.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan		80 Indeks	82 Indeks	84 Indeks	88 Indeks	90 Indeks						
	Output 1. Layanan BMN tingkat Kementerian		*15 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*						
KEGIATAN 7097	**PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN KEMENTERIAN HUKUM**							**1.838.938,23**	**1.928.693,08**	**2.025.127,73**	**2.126.384,11**	**2.232.703,31**	**Biro Umum**
	SK 7097.1 Terwujudnya pengawasan kearsipan Kementerian Hukum	**Pusat**											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7097.1.1 Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan		89,5 Nilai	90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai						
	Output 1. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
	SK 7097.2 Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal	**Pusat**											
	IKK 7097.2.1 Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan		3,70 Indeks	3,72 Indeks	3,74 Indeks	3,76 Indeks	3,79 Indeks						
	Output 1. Layanan BMN Satker Eselon I Setjen		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Sarana Internal		*62 Unit*	*244 Unit*	*244 Unit*	*244 Unit*	*244 Unit*						
	Output 6. Layanan Prasarana Internal		*2 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*						
KEGIATAN 7098	**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM**							**169.934,97**	**134.127,40**	**141.783,26**	**146.772,42**	**154.111,04**	**Pusat Data dan Teknologi Informasi**
	SK 7098.1 Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	**Pusat**											
	IKK 7098.1.1 Indeks SPBE Kementerian Hukum		4,36 Indeks	2,60 Indeks	3,00 Indeks	3,30 Indeks	3,50 Indeks						
	IKK 7098.1.2 Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum		25%	50%	75%	85%	100%						
	IKK 7098.1.3 Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral		3,39 Indeks	2,60 Indeks	3,00 Indeks	3,30 Indeks	3,50 Indeks						
	Output 1. Kajian Regulasi TI Kementerian Hukum		*5 Rekomendasi Kebijakan*	*9 Rekomendasi Kebijakan*	*9 Rekomendasi Kebijakan*	*9 Rekomendasi Kebijakan*	*9 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Satu Data Kementerian dan Statistik Sektoral		*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	Output 3. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusdatin		*36 Unit*										
	Output 4. Peralatan Komputasi Pusdatin			*7 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*						
	Output 5. Peralatan Perangkat Lunak SuperApps			*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*						
	Output 6. Layanan Pemeliharaan Peralatan Komputasi Pusdatin			*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*						
	Output 7. Layanan Pemerliharaan Data Center dan Server Kemenkum		*20 Unit*										
	Output 8. Sistem Informasi Pusdatin		*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*						
	Output 9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kementerian		*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*						
	Output 10. Penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah dan UPT		*41 Lembaga*										
	Output 11. Sistem Informasdii Tata Kelola Regulasi		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*									
	Output 12. Penguatan Database dan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Hukum				*1 Sistem Informasi*								
	SK 7098.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7098.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,60 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks						
	Output 1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 2. Layanan Umum			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Sarana Internal		*1 Unit*										
	Output 5. Layanan Manajemen SDM		*73 Orang*	*73 Orang*	*76 Orang*	*79 Orang*	*82 Orang*						
	Output 6. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Reformasi Kinerja		*1 Dokumen*										
	Output 8. Layanan Manajemen Kinerja			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Layanan*										
KEGIATAN 7099	**PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**							**827.681,81**	**930.669,22**	**977.156,64**	**1.025.974,98**	**1.077.230,86**	**Kantor Wilayah**
	SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Wilayah**											
	IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
	SK 7099.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**WIlayah**											
	IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		*33 Layanan*				*33 Layanan*						
	Output 2. Layanan Manajemen SDM		*3624 Orang*	*3788 Orang*	*3961 Orang*	*4145 Orang*	*4337 Orang*						
	Output 3. Pemantauan dan Evaluasi			*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*	*33 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah		*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*	*165 Dokumen*						
	Output 5. Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan		*66 Laporan*				*33 Laporan*						
	Output 6. Layanan BMN		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 7. Layanan Kerja Sama		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
	Output 8. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 9. Layanan Protokoler		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 10. Layanan Umum		*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*	*231 Laporan*						
	Output 11. Layanan Perkantoran		*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*	*33 Layanan*						
	Output 12. Layanan Sarana Internal		*5336 Unit*	*2681 Unit*	*2801 Unit*	*2929 Unit*	*3063 Unit*						
	Output 13. Layanan Prasarana Internal		*153 Unit*	*39 Unit*	*78 Unit*	*84 Unit*	*91 Unit*						
	Output 14. Layanan Reformasi Kinerja		*99 Laporan*										
	Output 15. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*99 Laporan*										
	Output 16. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*	*33 Laporan*						
	Output 17. Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		*66 Laporan*										
	Output 18. Pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum		*66 Laporan*										
KEGIATAN 7100	**PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I**							**4.089,51**	**5.106,78**	**6.128,02**	**7.354,31**	**8.825,89**	**Inspektorat Wilayah I**
	SK 7100.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum	**Pusat**											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7100.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%						
	Output 1. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7100.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Pusat**											
	IKK 7100.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		75%	77%	79%	81%	83%						
	Output 1. Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan Internal			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7100.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	**Pusat**											
	IKK 7100.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7100.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	**Pusat**											
	IKK 7100.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7100.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	**Pusat**											
	IKK 7100.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Audit Internal Dalam Kota di Provinsi DKI Jakarta		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 6. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Bali		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Papua			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 8. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Jambi			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 10. Layanan Peningkatan Pengendalian Korupsi			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 11. Layanan Layanan Audit Internal		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7101	**PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH II**							**4.089,51**	**4.947,75**	**5.888,89**	**7.066,67**	**8.480,00**	**Inspektorat Wilayah II**
	SK 7101.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum	**Pusat**											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7101.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%						
	Output 1. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7101.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Pusat**											
	IKK 7101.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		75%	77%	79%	81%	83%						
	Output 1. Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan Internal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	SK 7101.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	**Pusat**											
	IKK 7101.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7101.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	**Pusat**											
	IKK 7101.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7101.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	**Pusat**											
	IKK 7101.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Audit Internal dalam Perkantoran yang Sama		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Lampung		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 6. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 8. Layanan Peningkatan Pengendalian Korupsi			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan Audit Internal		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7102	**PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III**							**4.089,51**	**5.058,84**	**5.939,62**	**7.127,55**	**8.553,06**	**Inspektorat Wilayah III**
	SK 7102.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum	**Pusat**											
	IKK 7102.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7102.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Pusat**											
	IKK 7102.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		75%	77%	79%	81%	83%						
	Output 1. Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan Internal			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7102.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	**Pusat**											
	IKK 7102.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7102.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	**Pusat**											
	IKK 7102.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7102.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	**Pusat**											
	IKK 7102.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Audit Internal dalam Perkantoran yang Sama		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Riau		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi DI Yogyakarta		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Maluku		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 6. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 8. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Banten			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan Peningkatan Pengendalian Korupsi			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 10. Layanan Audit Internal		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7103	**PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV**							**4.089,51**	**6.096,27**	**7.269,10**	**8.722,92**	**10.467,50**	**Inspektorat Wilayah IV**
	SK 7103.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum	**Pusat**											
	IKK 7103.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%						
	Output 1. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7103.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Pusat**											
	IKK 7103.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		75%	77%	79%	81%	83%						
	Output 1. Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan Internal			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7103.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	**Pusat**											
	IKK 7103.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7103.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	**Pusat**											
	IKK 7103.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7103.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	**Pusat**											
	IKK 7103.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Audit Internal dalam Perkantoran yang Sama		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 6. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 8. Layanan Peningkatan Pengendalian Korupsi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan Pengawasan Satuan Kerja Luar Negeri			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 10. Layanan Audit Internal		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7104	**PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH V**							**4.089,51**	**5.117,66**	**5.989,76**	**7.187,71**	**8.625,25**	**Inspektorat Wilayah V**
	SK 7104.1 Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum	**Pusat**											
	IKK 7104.1.1 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti		80%	82%	84%	86%	88%						
	Output 1. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7104.2 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal	**Pusat**											
	IKK 7104.2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal		75%	77%	79%	81%	83%						
	Output 1. Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Auditor Eksternal dan Internal		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7104.3 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP	**Pusat**											
	IKK 7104.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7104.4 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI	**Pusat**											
	IKK 7104.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7104.5 Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK	**Pusat**											
	IKK 7104.5.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK		90%	91%	92%	93%	94%						
	Output 1. Layanan Audit Internal dalam Perkantoran yang Sama		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Audit Internal dalam Provinsi DKI Jakarta		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Aceh		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5.Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 6. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 8. Layanan Audit Internal luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 9. Layanan Peningkatan Pengendalian Korupsi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 10. Layanan Audit Internal		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7105	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN HUKUM**							**32.359,19**	**28.024,08**	**33.628,90**	**40.354,68**	**48.425,62**	**Sekretariat Inspektorat Jenderal**
	SK 7105.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7105.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Semua hasil audit BPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7105.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7105.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,60 Indeks	3,61 Indeks	3,62 Indeks	3,63 Indeks	3,64 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		*1 Laporan*										
	Output 2. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Data dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 8. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Sarana Internal		*447 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 10. Layanan Manajemen SDM		*104 Orang*	*201 Orang*	*201 Orang*	*201 Orang*	*201 Orang*						
	Output 11. Laporan Kinerja Unit Eselon I		*1 Dokumen*										
	Output 12. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*3 Laporan*										
	Output 13. Layanan Manajemen Kinerja			*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*						
	Output 14. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 15. Layanan Reformasi Kinerja		*1 Dokumen*										
	Output 16. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 17. Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal		*3 Sistem Informasi*										
	Output 18. Sistem Informasi Pengawasan Internal			*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*	*3 Sistem Informasi*						
	Output 19. Layanan Pemeliharaan Peralatan Komputasi Inspektorat Jenderal			*216 Unit*	*216 Unit*	*216 Unit*	*216 Unit*						
	Output 20. Data dan Informasi Publik Unit Inspektorat Jenderal		*8 Data*										
	Output 21. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Itjen		*1 Unit*										
	Output 22. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		*5 Unit*										
	SK 7105.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Inspektorat Jenderal	**Pusat**											
	IKK 7105.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Inspektorat Jenderal		90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Dokumen*										
	Output 2. Fasilitasi dan Koordinasi Kesekretariatan			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7105.4. Meningkatnya Kapabilitas APIP	**Pusat**											
	IKK 7105.4.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP		88,1%	88,5%	89%	89,5%	90%						
	Output 1. Peningkatan Kapabilitas APIP		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
KEGIATAN 7113	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BHP**							**38.745,94**	**32.863,71**	**35.112,20**	**37.533,65**	**40.142,76**	**Balai Harta Peninggalan**
	SK 7113.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	**Wilayah**											

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7113.1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP		100%	100%	100%	100%	100%						
	- IKK 7113.2.1 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
	Output 1. Layanan Reformasi Kinerja		*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*						
	Output 2. Layanan BMN		*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*4 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 4. Layanan Umum		*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 5. Layanan Perkantoran		*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 6. Layanan Sarana Internal		*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 7. Layanan Prasarana Internal		*-*	*1 Unit*	*-*	*-*	*-*						
	Output 8. Layanan Pengelolaan SDM		*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*5 Layanan*						
	Output 9. Layanan Manajemen SDM		*172 Orang*	*153 Orang*	*153 Orang*	*153 Orang*	*153 Orang*						
	Output 10. Layanan Pengelolaan Anggaran		*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*						
	Output 11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*5 Dokumen*										
	Output 12. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*3 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*						
	Output 13. Layanan Manajemen Keuangan		*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*						
	Output 14. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*5 Laporan*						
KEGIATAN 7114	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN AHU**							**299.148,62**	**643.916,40**	**346.646,32**	**370.662,32**	**396.569,35**	**Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**
	SK 7114.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7114.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Pengelolaan Anggaran		*1 Dokumen*										
	Output 2. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Laporan*	*11 Dokumen*	*11 Dokumen*	*11 Dokumen*	*11 Dokumen*						
	SK 7114.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7114.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,53 Indeks	3,54 Indeks	3,55 Indeks	3,56 Indeks	3,57 Indeks						
	Output 1. Layanan Sosialisasi		*500 Orang*	*0*	*0*	*0*	*0*						
	Output 2. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		*1 Laporan*	*0*	*0*	*0*	*0*						
	Output 3. Layanan Kerja Sama		*1 Dokumen*	*10 Dokumen*	*10 Dokumen*	*10 Dokumen*	*10 Dokumen*						
	Output 4. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 8. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 10. Layanan Sarana Internal		*665 Unit*	*665 Unit*	*665 Unit*	*665 Unit*	*665 Unit*						
	Output 11. Layanan Prasarana Internal		*1 Unit*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*						
	Output 12. Layanan Pengelolaan SDM		*1 Layanan*	*0*	*0*	*0*	*0*						
	Output 13. Layanan Manajemen SDM		*562 Orang*	*562 Orang*	*562 Orang*	*562 Orang*	*562 Orang*						
	Output 14. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*1 Laporan*	*0*	*0*	*0*	*0*						
	Output 15. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 16. Layanan Reformasi Kinerja		*1 Laporan*	*0*	*0*	*0*	*0*						
	Output 17. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 18. Layanan Manajemen Kinerja		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 19. Fasilitasi dan Koordinasi Kesekretariatan			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7114.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum	**Pusat**											
	IKK 7114.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum		85 Nilai	85,5 Nilai	86 Nilai	86,5 Nilai	87 Nilai						
	Output 1. Penyusunan Program Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
KEGIATAN 7122	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL**							**363.502,01**	**392.262,29**	**437.881,15**	**450.434,62**	**468.499,65**	**Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelaktual**
	SK 7122.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7122.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7122.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	**Pusat**											
	IKK 7122.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual		85,0 Nilai	85,1 Nilai	85,2 Nilai	85,3 Nilai	85,4 Nilai						
	Output 1. Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran		*4 Dokumen*										
	Output 2. Layanan Manajemen Strategi KI			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja		*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7122.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7122.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,40 Indeks	3,41 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan Hukum			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 8. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Sarana Internal		*600 Unit*	*600 Unit*	*600 Unit*	*600 Unit*	*600 Unit*						
	Output 10. Layanan Prasarana Internal		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 11. Layanan Pengelolaan SDM		*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*						
	Output 12. Layanan Manajemen SDM		*1141 Orang*	*1141 Orang*	*1141 Orang*	*1141 Orang*	*1141 Orang*						
	Output 13. Layanan Pengelolaan Keuangan		*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*						
	Output 14. Layanan Reformasi Kinerja		*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 15. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*						
	Output 16. Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia		*1 NSPK*	*1 NSPK*	*1 NSPK*								
KEGIATAN 7130	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PP**							**62.032,93**	**63.054,38**	**69.359,82**	**76.295,80**	**83.925,38**	**Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan**
	SK 7130.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7130.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7130.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7130.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks						
	Output 1. Layanan Kerja Sama		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Perkantoran		*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*						
	Output 8. Layanan Sarana Internal		*436 Unit*	*1002 Unit*	*1002 Unit*	*1002 Unit*	*1002 Unit*						
	Output 9. Layanan Prasarana Internal		*4236m2*	*4236m2*	*4236m2*	*4236m2*	*4236m2*						
	Output 10. Layanan Manajemen SDM		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 11. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*1 Laporan*										
	Output 12. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 13. Layanan Reformasi Kinerja		*1 Layanan*										
	Output 14. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 15. Layanan Manajemen Kinerja			*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*						
	SK 7130.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	**Pusat**											
	- IKK 7130.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan		90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran		*1 Dokumen*										
	Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
KEGIATAN 7137	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPHN**							**47.289,46**	**50.013,22**	**60.015,86**	**72.019,03**	**86.422,84**	**Sekretariat Badan Pembinan Hukum Nasional**
	SK 7137.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	- IKK 7137.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7137.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional	**Pusat**											
	IKK 7137.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional		90 NIlai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7137.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7137.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,85 Indeks	3,86 Indeks	3,87 Indeks	3,88 Indeks	3,89 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 2. Layanan Kerja Sama		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 8. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Sarana Internal		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 10. Layanan Prasarana Internal		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 11. Layanan Manajemen SDM		*100 Orang*	*100 Orang*	*100 Orang*	*100 Orang*	*100 Orang*						
	Output 12. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*1 Layanan*										
	Output 13. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 14. Layanan Manajemen Kinerja		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 15. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
	Output 16. Layanan Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 17. Pengelolaan Sistem Informasi di Lingkungan BPHN		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*						
	Output 18. Laporan Kinerja Unit Eselon I		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7138	**DUKUNGAN MANAJEMEN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**							**69.484,89**	**45.709,17**	**48.026,43**	**50.491,52**	**53.121,11**	**Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum**
	SK 7138.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7138.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	SK 7138.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7138.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,74 Indeks	3,75 Indeks	3,76 Indeks	3,77 Indeks	3,78 Indeks						
	Output 1. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 2. Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 3. Layanan Kerja Sama		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 4. Layanan BMN		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 6. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 8. Layanan Umum		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 10. Layanan Sarana Internal		*491 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 11. Layanan Prasarana Internal		*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*						
	Output 12. Layanan Manajemen SDM		*164 Orang*	*164 Orang*	*164 Orang*	*164 Orang*	*164 Orang*						
	Output 13. Penyusunan Program, Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran		*1 Dokumen*										
	Output 14. Laporan Kinerja Unit Eselon I		*1 Dokumen*										
	Output 15. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*1 Laporan*										
	Output 16. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
	Output 17. Layanan Reformasi Kinerja		*1 Dokumen*										
	Output 18. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 19. Layanan Manajemen Kinerja			*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*						
	Output 20. Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*						
	Output 21. Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*	*1 Sistem Informasi*						
	SK 7138.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7138.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum		90 NIlai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
KEGIATAN 7139	**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**							**6.050,38**	**3.170,09**	**3.328,60**	**3.495,03**	**3.669,78**	**Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum**
	SK 7139.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7139.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
	Output 1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum			*8 Rekomendasi Kebijakan*	*8 Rekomendasi Kebijakan*	*8 Rekomendasi Kebijakan*	*8 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)		*1 Dokumen*										
	Output 3. Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 4. Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
KEGIATAN 7140	**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM**							**3.375,92**	**4.222,97**	**4.434,12**	**4.655,83**	**4.888,62**	**Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum**
	SK 7140.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7140.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		*4 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP		*1 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 4 Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Bantuan Hukum		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
KEGIATAN 7141	**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM**							**3.082,93**	**3.767,79**	**3.956,18**	**4.153,99**	**4.361,69**	**Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum**
	SK 7141.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	**Pusat**											
	IKK 7141.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
	Output 1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum			*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 4. Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 5. Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
KEGIATAN 7142	**ANALISIS STRATEGI EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DAN PUBLIKASI HASIL ANALISIS KEBIJAKAN**							**3.173,80**	**2.936,00**	**3.082,80**	**3.236,94**	**3.398,78**	**Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum**
	SK 7142.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	**Pusat**											
	IKK 7142.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
	Output 1. Rekomendasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum			*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*	*6 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Publikasi Jurnal Ilmiah			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 3. Data dan Informasi Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum		*1 Sistem Informasi*										
	Output 5. Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		*1 Sistem Informasi*										
	Output 6. Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum		*4 Rekomendasi Kebijakan*										
	Output 7. Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		*Rekomendasi Kebijakan*										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 8. Data dan Informasi Publik		*1 Dokumen*										
	Output 9. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		*1 Dokumen*										
KEGIATAN 7143	**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH**							**11.681,07**	**16.652,48**	**17.485,08**	**18.359,32**	**19.277,29**	**Kantor Wilayah**
	SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
	Output 1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*	*66 Rekomendasi Kebijakan*						
	Output 2. Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		*3300 Orang*	*3300 Orang*	*3960 Orang*	*4620 Orang*	*5280 Orang*						
KEGIATAN 7144	**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN**							**99.157,85**	**84.448,49**	**48.598,92**	**50.287,16**	**52.034,10**	**Politeknik Pengayoman Indonesia**
	SK 7144.1 Meningkatnya Kualitas pendidikan pada Politeknik Pengayoman Indonesia	**Pusat**											
	IKK 7144.1.1 Persentase hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA terhadap total hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia		30%	30%	35%	40%	45%						
	IKK 7144.1.2 Persentase IPK Politeknik Pengayoman Indonesia dengan predikat minimal “Sangat Memuaskan"		50%	55%	60%	65%	70%						
	IKK 7144.1.3 Persentase jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Politeknik Pengayoman Indonesia (Dosen/Taruna)		75%	80%	85%	90%	95%						
	Output 1. Layanan Pendidikan Kedinasan			*1 layanan*	*1 layanan*	*1 layanan*	*1 layanan*						
	Output 2. Pendidikan Taruna Tk I Jurusan Pemasyarakatan		*280 Orang*										
	Output 3. Pendidikan Taruna Tk II Jurusan Ilmu Pemasyarakatan		*280 Orang*	*280 Orang*									
	Output 4. Pendidikan Taruna Tk III Jurusan Ilmu Pemasyarakatan		*350 Orang*	*272 Orang*									
	Output 5. Pendidikan Taruna Tk IV Jurusan Ilmu Pemasyarakatan		*347 Orang*	*347 Orang*									
	Output 6. Masa Basis Calon Taruna Jurusan Ilmu Pemasyarakatan		*280 Orang*										
	Output 7. Pendidikan Taruna Tingkat I Jurusan Imigrasi		*210 Orang*	*210 Orang*									
	Output 8. Pendidikan Taruna Tingkat II Jurusan Imigrasi		*309 Orang*	*309 Orang*									
	Output 9. Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Imigrasi		*311 Orang*	*311 Orang*									
	Output 10. Pendidikan Taruna Tingkat IV Jurusan Imigrasi		*304 Orang*										
	Output 11. Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi		*210 Orang*										
	Output 12. Masa Basis Calon Taruna			*200 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*						
	Output 13. Pendidikan Taruna Tingkat I Jurusan Hukum Terapan			*200 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*						
	Output 14. Pendidikan Taruna Tingkat II Jurusan Hukum Terapan				*240 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*						
	Output 15. Pendidikan Taruna Tingkat III Jurusan Hukum Terapan				*240 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*						
	Output 16. Pendidikan Taruna Tingkat IV Jurusan Hukum Terapan				*240 Orang*	*240 Orang*	*240 Orang*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7144.2 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia	**Pusat**											
	IKK 7144.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia		100%	100%	100%	100%	100%						
	IKK 7144.2.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia terhadap Layanan Kesekretariatan		3,92 Indeks	3,93 Indeks	3,94 Indeks	3,95 Indeks	3,96 Indeks						
	Output 1. Layanan Reformasi Kinerja		*2 Dokumen*										
	Output 2. Layanan Manajemen Kinerja			*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	Output 3. Layanan BMN		*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Protokoler			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Umum		*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*						
	Output 6. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 7. Layanan Sarana Internal		*28 Unit*	*28 Unit*	*28 Unit*	*28 Unit*	*28 Unit*						
	Output 8. Layanan Manajemen SDM		*185 Orang*	*185 Orang*	*185 Orang*	*185 Orang*	*185 Orang*						
	Output 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*2 Dokumen*										
	Output 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*						
	Output 11. Layanan Manajemen Keuangan		*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*						
KEGIATAN 7145	**PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL**							**12.066,86**	**12.304,21**	**12.686,04**	**13.079,78**	**13.485,79**	**Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional**
	SK 7145.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional Hukum	**Pusat**											
	IKK 7145.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan		80%	80%	80%	80%	80%						
	IKK 7145.1.2 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional Hukum		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7145.1.3 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Fungsional Hukum yang Meningkat Kinerjanya terhadap Total Alumni		91%	92%	93%	94%	95%						
	Output 1. Pelatihan Fungsional Bidang Hukum			*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*						
	Output 2. Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah		*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*						
	SK 7145.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7145.2.1 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional ASN Kementerian Hukum		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7145.2.2 Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7145.2.3 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.4 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analis Hukum pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.5 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 7145.2.6 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Penyuluh Hukum pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.7 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analis Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.8 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Desain Industri pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.9 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	IKK 7145.2.10 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan		0	6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks						
	Output 1. Layanan Pelatihan Fungsional		*21090 Orang*										
	Output 2. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan			*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*						
	Output 3. Pelatihan Fungsional Analis Hukum			*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*	*120 Orang*						
	Output 4. Pelatihan Fungsional Kurator Keperdataan			*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*						
	Output 5. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum			*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*						
	Output 6. Pelatihan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual			*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*						
	Output 7. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri			*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*						
	Output 8. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek			*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*						
	Output 9. Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten			*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*	*25 Orang*						
	Output 10. Pelatihan Fungsional Lainnya bagi ASN Kementerian Hukum			*21555 Orang*	*21555 Orang*	*21555 Orang*	*21555 Orang*						
KEGIATAN 1746	**PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR**							**6.476,88**	**6.849,70**	**895,65**	**923,57**	**952,37**	**Pusat Penilaian Kompetensi**
	SK 7146.1 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum	**Pusat**											
	IKK 7146.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan		80%	80%	80%	80%	80%						
	IKK 7146.1.2 Persentase ASN Bidang Hukum yang Telah Mengikuti Penilaian Kompetensi		92%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7146.1.3 Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang Ditindaklanjuti		92%	92%	93%	94%	95%						
	Output 1. Penilaian Kompetensi SDM Bidang Hukum			*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*						
	SK 7146.2 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7146.2.1 Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi		85%	87%	89%	91%	93%						
	IKK 7146.2.2 Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum Kementerian Hukum		95%	96%	97%	98%	99%						
	IKK 7146.2.3 Persentase hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti		91%	92%	93%	94%	95%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 1. Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum		*1556 Orang*										
	Output 2. Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum			*1425 Orang*	*1425 Orang*	*1425 Orang*	*1425 Orang*						
KEGIATAN 7147	**PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN**							**18.582,40**	**11.112,39**	**11.462,86**	**11.824,44**	**12.197,49**	**Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan**
	SK 7147.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum	**Pusat**											
	IKK 7147.1.1 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7147.1.2 Persentase alumni peserta Pelatihan teknis dan kepemimpinan ASN Kementerian Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni		91%	92%	93%	94%	95%						
	Output 1. Layanan Pelatihan Teknis ASN Kementerian Hukum		*17872 Orang*	*13145 Orang*	*13145 Orang*	*13145 Orang*	*13145 Orang*						
	Output 2. Layanan Pelatihan Kepemimpinan ASN Kementerian Hukum		*887 Orang*										
	Output 3. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (Blended Learning)			*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*	*60 Orang*						
	Output 4. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator												
	Output 5. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (Blended Learning)			*40 orang*	*40 orang*	*40 orang*	*40 orang*						
	Output 6. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas												
	Output 7. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (Blended Learning)			*40 Orang*	*40 Orang*	*40 Orang*	*40 Orang*						
	Output 8. Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil												
	Output 9. Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Blended Learning)												
	SK 7147.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum	**Pusat**											
	IKK 7147.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan		80%	80%	80%	80%	80%						
	IKK 7147.2.2 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum		91%	92%	93%	94%	95%						
	IKK 7147.2.3 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum yang Meningkat Kinerjanya terhadap Total Alumni		91%	92%	93%	94%	95%						
	Output 1. Layanan Pelatihan Teknis Bidang Hukum			*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*	*30 Orang*						
	Output 2. Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP		*342 Orang*	*342 Orang*	*342 Orang*	*342 Orang*	*342 Orang*						
KEGIATAN 7148	**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPSDM HUKUM**							**164.587,14**	**150.115,64**	**155.427,84**	**161.641,92**	**165.089,22**	**Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum**
	SK 7148.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Pusat**											
	IKK 7148.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output 1. Layanan Manajemen Keuangan		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 7148.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	**Pusat**											
	IKK 7148.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,67 Indeks	3,68 Indeks	3,69 Indeks	3,70 Indeks	3,71 Indeks						
	Output 1. Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		*1 Layanan*										
	Output 2. Layanan Kerja Sama		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 3. Layanan BMN		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 5. Layanan Protokoler		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
	Output 7. Layanan Umum		*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*						
	Output 8. Layanan Perkantoran		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	Output 9. Layanan Sarana Internal		*1061 Unit*	*178 Unit*	*178 Unit*	*178 Unit*	*178 Unit*						
	Output 10. Layanan Prasarana Internal		*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*	*6 Unit*						
	Output 11. Layanan Manajemen SDM		*246 Orang*	*219 Orang*	*219 Orang*	*219 Orang*	*219 Orang*						
	Output 12. Laporan Kinerja Unit Eselon I		*2 Laporan*										
	Output 13. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*2 Dokumen*										
	Output 14. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*						
	Output 15. Layanan Reformasi Kinerja		*2 Layanan*										
	Output 16. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*2 Layanan*						
	Output 17. Layanan Manajemen Kinerja			*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*						
	SK 7148.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup BPSDM Hukum	**Pusat**											
	IKK 7148.3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup BPSDM Hukum		90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
	Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*2 Dokumen*										
	Output 2. Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran		*3 Dokumen*										
	Output 3. Fasilitasi dan Koordinasi Kesekretariatan			*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*						
KEGIATAN 7149	**MENINGKATNYA LAYANAN PELATIHAN HUKUM DI WILAYAH**							**50.680,18**	**42.060,64**	**204.070,14**	**49.156,47**	**50.446,82**	**Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum**
	SK 7149.1 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum	**Wilayah**											
	IKK 7149.1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	IKK 7149.1.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan		3,92 Indeks	3,93 Indeks	3,94 Indeks	3,95 Indeks	3,96 Indeks						
	Output 1. Layanan Reformasi Kinerja		*3 Dokumen*										
	Output 2. Layanan Manajemen Kinerja			*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*						
	Output 3. Layanan Kerja Sama		*2 Layanan*										
	Output 4. Layanan BMN		*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*						
	Output 5. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	Output 6. Layanan Protokoler		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	Output 7. Layanan Umum		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						
	Output 8. Layanan Perkantoran		*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*	*3 Layanan*						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output 9. Layanan Sarana Internal		*57 Unit*	*37 Unit*	*37 Unit*	*37 Unit*	*37 Unit*						
	Output 10. Layanan Prasarana Internal		*4 Unit*	*4 Unit*	*4 Unit*								
	Output 11. Layanan Manajemen SDM		*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*	*55 Orang*						
	Output 12. Fasilitasi Evaluasi Kinerja		*1 Laporan*										
	Output 13. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		*3 Dokumen*										
	Output 14. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*						
	Output 15. Layanan Manajemen Keuangan		*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*						
	Output 16. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
	SK 7149.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7149.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Hukum di Balai Diklat Hukum terhadap Standar Pelayanan		0%	0%	80%	80%	80%						
	IKK 7149.2.2 Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Balai Diklat Hukum		0%	0%	93%	94%	94%						
	Output 1. Layanan Pelatihan Bidang Hukum				*75 Orang*	*75 Orang*	*75 Orang*						
	SK 7149.3 Meningkatnya Layanan Pelatihan ASN Kementerian Hukum di wilayah	**Wilayah**											
	IKK 7149.3.1 Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah		95%	96%	96%	97%	97%						
	Output 1. Layanan Pelatihan Bidang Hukum		*10851 Orang*	*8824 Orang*	*8824 Orang*	*8824 Orang*	*8824 Orang*						
	Output 2. Layanan Pelatihan Dasar CPNS		*1615 Orang*		*567 Orang*	*567 Orang*	*567 Orang*						

LAMPIRAN II: Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Hukum

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP 02 : Penerapan dan Penegakan Hukum	**Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum**	**58,70%**				**62,70%**															
	Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	**35%**				**55%**															
Pro-P : Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian																					
RUU KUH Acara Perdata	Jumlah RUU KUH Acara Perdata yang dibahas di DPR	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp1.847	Rp938	Rp1.032	Rp1.135	Rp1.249	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.847	Rp938	Rp1.032	Rp1.135	Rp1.249
RUU Kepailitan & PKPU	Jumlah RUU Kepailitan yang disusun di tingkat Panitia Antar Kementerian	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp589	Rp450	Rp495	Rp545	Rp599	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp589	Rp450	Rp495	Rp545	Rp599
RUU Desain Industri	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri yang disusun		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU		Rp500	Rp550	Rp605	Rp666	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500	Rp550	Rp605	Rp666
RUU Hukum Perdata Internasional	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional yang disusun		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU		Rp500	Rp550	Rp605	Rp666	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500	Rp550	Rp605	Rp666
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *The Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters* (HCCH 1965 *Service Convention*)	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan The Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (HCCH 1965 Service Convention) yang disusun		1 Rperpres	1 Rperpres	1 Rperpres	1 Rperpres	Rp0	Rp100	Rp110	Rp121	Rp133	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100	Rp110	Rp121	Rp133
Draft Naskah Akademik RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Jumlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disusun		1 Rekomendasi Kebijakan				Rp0	Rp642	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp642	Rp0	Rp0	Rp0

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	Jumlah NSPK Pedoman Rancangan Awal Road Map dan Naskah Konsepsi Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK			Rp2.757	Rp4.531	Rp4.757	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.757	Rp4.531	Rp4.757	Rp0	Rp0
RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Jumlah RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disusun di tingkat Panitia Antar Kementerian			1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp0	Rp0	Rp706	Rp777	Rp855	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp706	Rp777	Rp855
RUU Badan Usaha	Jumlah RUU Badan Usaha yang disusun di tingkat Panitia Antar Kementerian			1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp0	Rp0	Rp907	Rp998	Rp1.098	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp907	Rp998	Rp1.098
Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Beneficial Ownership	Jumlah dokumen kebijakan dalam rangka penguatan Beneficial Ownership yang disusun				1 Rekomendasi Kebijakan		Rp0	Rp0	Rp0	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500	Rp0
Pro-P : Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berspektif Restoratif																					
Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP	Persentase *Training of Facilitator* (ToF) Implementasi KUHP yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Peserta yang Mengikuti *Training of Facilitator* Implementasi KUHP Persentase Alumni *Training of Facilitator* (ToF) Implementasi KUHP yang Dibina	342 Orang	342 Orang	342 Orang	342 Orang	342 Orang	Rp1.833	Rp3.094	Rp3.203	Rp3.315	Rp3.431	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.833	Rp3.094	Rp3.203	Rp3.315	Rp3.431
RPP Pelaksanaan UU KUHP	Jumlah RPP Pelaksanaan UU KUHP yang dibahas	4 RPP					Rp1.007	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.007	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
KP 04 : Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	***Clearence Rate* tindak pidana narkoba**	**90%**				**94%**															
Pro-P : Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba																					

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RUU Narkotika dan Psikotropika	Jumlah RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang dibahas di DPR	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp1.299	Rp858	Rp944	Rp1.038	Rp1.142	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.299	Rp858	Rp944	Rp1.038	Rp1.142
KP 01 : Mendirikan Pusat Legislasi Nasional	**Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan**	**3,26**				**3,30**															
Pro-P : Peningkatan Kualitas Regulasi																					
Pedoman Evaluasi Peraturan dan Perundang - Undangan	Jumlah Pedoman Evaluasi PUU		1 NSPK				Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0
Informasi Indeks Reformasi Hukum	Jumlah Dokumen Indeks Reformasi Hukum		1 Dokumen				Rp0	Rp1.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.900	Rp0	Rp0	Rp0
Koordinasi Piloting Analisis dan Evalusi Regulasi Tematik	Jumlah koordinasi Analisis dan Evaluasi Regulasi Tematik			1 Kegiatan			Rp0	Rp0	Rp1.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200	Rp0	Rp0
Pro-P : Penguatan Kelembagaan Regulasi																					
Draft Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun		1 Rekomendasi Kebijakan				Rp0	Rp697	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp697	Rp0	Rp0	Rp0
Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi	Jumlah Sistem Informasi Tata kelola bidang regulasi yang disusun	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Rp1.000	Rp1.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000	Rp1.000	Rp0	Rp0	Rp0
Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah	Persentase Pelatihan Fungsional Analis Hukum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan Fungsional Analis Hukum Persentase Alumni Pelatihan Fungsional Analis Hukum yang Dibina	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Rp1.837	Rp1.837	Rp1.901	Rp1.968	Rp2.036	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.837	Rp1.837	Rp1.901	Rp1.968	Rp2.036

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun di tingkat Panitia Antar Kementerian			1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp0	Rp0	Rp767	Rp844	Rp928	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp767	Rp844	Rp928
KP 02 : Transformasi Akses Terhadap Keadilan	**Indeks Perlindungan Saksi dan Korban**	**81**				**89**															
	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi	**88,2 %**				**92,2%**															
Pro-P : Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan																					
Draft Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Jumlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang disusun		1 Rekomendasi Kebijakan				Rp0	Rp582	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp582	Rp0	Rp0	Rp0
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Jumlah RUU tentang Bantuan Hukum yang disusun di tingkat Panitia Antar Kementerian			1 RUU	1 RUU	1 RUU	Rp0	Rp0	Rp640	Rp704	Rp774	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp640	Rp704	Rp774
Pro-P : Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan																					
Fasilitasi dan Pembinaan Panita Pengawas Daerah	Jumlah Kelompok Kerja Daerah yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas		33 Lembaga				Rp0	Rp2.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000	Rp0	Rp0	Rp0
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	6263 Orang	6271 Orang	7817 Orang	9305 Orang	9305 Orang	Rp50.104	Rp50.168	Rp50.168	Rp50.168	Rp50.168	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.104	Rp50.168	Rp50.168	Rp50.168	Rp50.168
Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	839 Kegiatan	843 Kegiatan	1189 Kegiatan	1966 Kegiatan	1966 Kegiatan	Rp8.952	Rp8.995	Rp8.995	Rp8.995	Rp8.995	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.952	Rp8.995	Rp8.995	Rp8.995	Rp8.995

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan		33 Lembaga					Rp4.386									Rp0	Rp4.386	Rp0	Rp0	Rp0
Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverikasi dan Akreditasi			777 Lembaga			Rp0	Rp0	Rp2.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.800	Rp0	Rp0
KP 03 : Penguatan Budaya Hukum																					
Pro-P : Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat																					
Informasi Peta Permasalahan Hukum	Jumlah dokumen peta permasalahan hukum		1 Dokumen				Rp0	Rp539	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp539	Rp0	Rp0	Rp0
Penyusunan Roadmap Penguatan Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat	Jumlah Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat					1 Rekomendasi Kebijakan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500

LAMPIRAN III:
Matriks Kerangka Regulasi

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	RUU Kepailitan sudah sangat penting untuk diperbarui dalam rangka mendukung peningkatan skor Indonesia dalam survei Business Ready (B-Ready) oleh World Bank yang merupakan pengganti survei EoDB, yaitu pada indikator *Business Insolvency* yang masuk dalam klaster penutupan usaha *(closing a business).*	Direktorat Perdata	▪ Mahkamah Agung ▪ Bank Indonesia ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ Akademisi ▪ Organisasi Profesi Advokat ▪ Organisasi Profesi Notaris ▪ Organisasi Profesi Kurator	
2	RUU Tentang Badan Usaha	RUU Badan Usaha diperlukan mengingat adanya UU Cipta Kerja yang mengubah tatanan pengaturan entitas usaha di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pengaturan badan usaha di Indonesia	Direktorat Badan Usaha	▪ Kemenko Perekonomian ▪ Kementerian Investasi/BKPM ▪ Kementerian Perdagangan ▪ Kementerian Keuangan ▪ Kementerian Kop UKM ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ PPATK ▪ Mahkamah Agung	
3	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	▪ Optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktik terbaik internasional ▪ Elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM ▪ Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia	Direktorat Badan Usaha	▪ Kemenko Perekonomian ▪ Kementerian Perdagangan ▪ Kementerian Kop UKM ▪ Kementerian Keuangan ▪ Kementerian Perindustrian ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ Kemenparekraf/Baparekraf ▪ Organisasi Profesi Notaris ▪ Akademisi	
4	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	▪ Salah satu misi RPJPN 2020 – 2045 ▪ Banyak perkara-perkara yang bersifat transnasional yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan, karena adanya kekosongan	Diretorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	▪ Mahkamah Agung ▪ Kejaksaan Agung. ▪ Kemenko Polhukam ▪ Kementerian Sekretariat Negara ▪ Kementerian Luar Negeri	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		hukum dalam menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam menyelesaikan perkara transnasional tersebut.			
5	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	Kebutuhan masyarakat terkait dengan amnesti, abolisi dan rehabilitasi, hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang	Direktorat Pidana	▪ Sekretariat Negara ▪ Mahkamah Agung	
6	RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum		BPHN	▪ Mahkamah Agung ▪ Kejaksaan Agung ▪ Kepolisian ▪ Kemenpolkam ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu ▪ KemenkoH2IP ▪ Kemendagri ▪ Kemendes ▪ Pemerintah Daerah ▪ Institusi lainnya yang melaksanakan penegakan hukum, pembentukan regulasi, dan pelaksanaan undang-undang.	
7	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	Belum komprehensifnya pengaturan terkait dengan pembinaan hukum (Hukum tertulis dan tidak tertulis) serta belum optimalnya perencanaan, monev, dan kepatuhan hukum dalam pembentukan PUU pada K/L/Pemda (dst.)	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusren)	▪ Seluruh K/L lingkungan ▪ Pemerintah Daerah ▪ Badan Usaha ▪ Badan Hukum	
8	RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)	Evaluasi terhadap terjadinya tumpang tindih peraturan, *hyper regulation*, disharmoni peraturan ▪ Hierarki Peraturan ▪ Jenis dan materi muatan ▪ Tahapan Pembentukan Peraturan ▪ Harmonisasi Peraturan	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kementerian Dalam Negeri	2028
9	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Penambahan pengaturan mengenai: ▪ Reformulasi delik suap. ▪ Kriminalisasi delik ▪ memperkaya diri secara tidak sah *(illicit enrichment)* ▪ Kriminalisasi delik memperdagangkan	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung ▪ KPK	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pengaruh *(trading in influence).* ▪ Kriminalisasi delik suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional *(bribery of foreign public officials and officials of public international organizations).* ▪ Kriminalisasi delik suap di sektor swasta *(bribery in the provate sector).* ▪ Kriminalisasi perbuatan persiapan			
10	RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana	▪ Belum terbentuknya prosedur dan mekanisme Stolen Aset Recovery (StAR) ▪ Kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA. ▪ Pengaturan mengenai Aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, pengelolaan aset	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung ▪ KPK	2026
11	RUU tentang Hukum Acara Perdata	▪ PUU peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat ▪ Mengganti Hukum Acara Perdata	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung	2025
12	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	Pendekatan hukum dalam UU Narkotika 35/2009 tentang Narkotika saat ini masih berfokus pada penghukuman (punitif) yang menelan banyak biaya finansial & sosial, pemenjaraan yang masif bagi konsumsi Narkotika/ Psikotropika yang tidak membahayakan (non-violent), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu.	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ BNN ▪ Mahkamah Agung	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. HCDI - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2025
14	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta		Dit. HCDI - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
15	RUU tentang Indikasi Geografis		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
16	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang		Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
17	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
18	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal		Dit. HCDI - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029

2. PP dan RPP

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Penambahan substansi: ▪ Menambah subjek Anak dalam Pasal 3A PP 21/2022 ▪ Penambahan batas waktu pada pasal 67A bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei	Direktorat Tata Negara		

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		2024 menjadi 5 tahun ▪ Meniadakan persyaratan keterangan keimigrasian untuk mengakomodir anak keturunan WNI yang lahir dan tinggal di luar negeri			
2	Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU	▪ UU 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 ▪ Pengaturan mengenai substansi baru yang ada dalam perubahan UU 12 Tahun 2011	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolhukam ▪ Kemendagri	2026
3	RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat	Pendelegasian Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ▪ Penetapan Hukum Adat ▪ Kriteria Hukum Adat	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolhukam ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung	2025
4	RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi	Pendelegasian Pasal 111 dan 124 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ▪ Pidana dan Tindakan terhadap Orang ▪ Pidana dan Tindakan terhadap Korporasi	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolhukam ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung	2025
5	RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun	Pendelegasian Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ▪ Perubahan Pidana 20 Tahun ▪ Perubahan Pidana Mati menjadi Seumur hidup	Direktorat Perancangan – Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolhukam ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung	2025
6	RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. Penyidikan - Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2025

3. Perpres dan RPerpres

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rperpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Regulasi perlu pembaharuan	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat JDIHN)	▪ Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum: K/L, LPNK, Pemda (Provinsi/ Kab/Kota), Sekretariat DPRD (Provinsi/Kab/Kota) ▪ Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; ▪ Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.	2026

4. Permenkum dan RPermenkum

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik	Perbaikan untuk pengaturan syarat, tata cara, pelaksanaan pelayanan dan sanksi keterlambatan oleh Notaris pada pelaporan wasiat serta mengatur syarat, tata carfa dan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan wasiat oleh umum dan Notaris.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
2	RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Organisasi Notaris	2/2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris			
3	RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Notaris, tambahan ketentuan syarat pindah karena keadaan tertentu, perpindahan karena pemekaran wilayah, dan penyederhanaan ketentuan terkait pemberhentian Notaris	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
4	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah	▪ Pengaturan mengenai persyaratan usia pensiun untuk Penerjemah Tersumpah. ▪ Perubahan proses bisnis layanan yang semula manual menjadi elektronik.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
5	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham	Permenkumham 19/2020 belum diatur mengenai produk hukum legalisasi yaitu stiker legalisasi mulai dari bentuk, ukuran, informasi yang dimuat dalam stiker, kode pengamanan, dll. Hal ini menjadi celah bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukannya	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
6	RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer	Perubahan PP OSS, sehingga perlu adanya penyesuaian, ditambah adanya penambahan layanan untuk PP, Firma dan CV, serta penambahan layanan perbaikan data, pemblokiran dan pembukaan pemblokiran	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
7	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data	Terdapat permohonan non elektronik yang tidak terakomodir pada Permenkumham 17/2017	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan				
8	PermenKum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan TU	Kementerian Hukum	2025
9	PermenKum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
10	Perubahan PermenKum HAM Tentang Sistem Kerja	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
11	PermenKum Tentang Tunjangan Kinerja	Pembaharuan PermenKum HAM 33/2017	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
12	PermenKum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerjemahan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2027
13	PermenKum Tentang Renstra KemenKum HAM 2025 – 2029	Dasar hukum pelaksanaan Renstra 2025 – 2029	Bagian Program dan Anggaran	Kementerian Hukum	2025
14	Permenkum SOTK Poltek PIN	Respons atas perubahan desain organisasi	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
15	Perkmenkum Statuta	Pendetailan kebijakan teknis dari Permenkum SOTK	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
16	Reviu PermenKum HAM 22/2022	Belum tercantum kelas jabatan Direktur dan Wakil Direktur	Biro SDM		2024
17	RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum	Pengganti 25/2013 karena tidak mengatur tentang WBS Belum ada kewajiban integrasi WBS kum dan KPK	Inspektorat Jenderal		2025
18	RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi	Belum mengatur daftar gratifikasi berdasarkan WBS KPK Mengandung nilai nominal 350.000 – 1.000.000 – risiko penyalahgunaan	Inspektorat Jenderal		2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Mengacu ke peraturan KPK tentang gratifikasi yang terbaru			
19	RPermenkum tentang UKI		Inspektorat Jenderal		2026
20	RPermenkum tentang Pungli	Tindak lanjut Perpres Saber Pungli, belum ada peraturan yang mengatur turunan Perpres tersebut	Inspektorat Jenderal		2026
21	RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan	Regulasi sudah tidak relevan karena sudah terlalu lama	Inspektorat Jenderal		2027
22	RPermenkum Tentang *Roadmap* Budaya Anti Korupsi	Pembaharuan dari KepmenKumHAM tentang *Roadmap* Budaya Anti Korupsi	Inspektorat Jenderal		2027
23	RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum		BPHN	▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
24	RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum		BPHN	Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Setwan DPRD sebagai anggota JDIH	2026
25	RPermenkum Tentang Audit Hukum		Pusanev BPHN	▪ Sekretariat Kabinet ▪ BPHN ▪ Ditjen PUU ▪ BSK ▪ Biro Perencanaan dan Organisasi ▪ Asahi ▪ Masyarakat/ pelaku usaha	2026
26	RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan		Pusanev BPHN	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	2026
27	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01 PR.08.10 TAHUN 2006		BPHN	▪ K/L ▪ Pemda ▪ Masyarakat ▪ Aparatur Sipil Negara	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Pola Penyuluhan Hukum				
28	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum		BPHN	Kementerian, LPNK, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemda	2025
29	Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham		BPHN	▪ Eselon I; ▪ Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja sama serta; ▪ Kanwil Kemenkum	2025
30	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum		BPHN	▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
31	Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum		BPHN	▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
32	RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang	Tata Cara Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan PP/Perpres, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh K/L serta Pemda belum diatur secara komprehensif, serta belum adanya PUU yang mengatur	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah	mengenai *monitoring* dan evaluasi pembentukan PUU			
33	RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik	Peraturan yang saat ini ada belum mengatur secara komprehensif terkait mekanisme dan tata cara penyelarasan Naskah Akademik	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025
34	RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah	Pemutakhiran mekanisme dan prosedur serta kepastian hukum penerapan surat perintah dan percepatan penyelenggaraan proses Harmonisasi	Direktorat Harmonisasi PUU – Ditjen PP		2025
35	Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023	Berdasarkan hasil evaluasi proses pengundangan berdasarkan Permenkumham 23/2023 perlu pengaturan yang jelas terkait pejabat yang berwenang menandatangani apabila terjadi peralihan pejabat	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh K/L	2026
36	Permenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan	▪ Sebagai pedoman dalam menerbitkan Terjemahan Resmi PUU ▪ Ada beberapa hal yang belum diatur dalam Permenkumham 13/2018 tentang Penerjemahan Resmi PUU	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah	2025
37	RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah	▪ Dalam rangka memperkuat kedudukan Kemenkum sebagai koordinator dalam penanganan Pengujian UU di MK dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah ▪ Sebagai pedoman dalam proses tahapan serta mengetahui hal-hal yang harus disiapkan selama proses pengujian PUU, sehingga dapat	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		memperlancar koordinasi dalam proses beracara baik di MK atau MA			
38	RPermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi	▪ Kemenkumham selaku Koordinator *judicial review* (JR) dan penerima Kuasa Khusus Presiden dalam menangani perkara dan mempertahankan PUU yang sedang diuji dan dalam rangka upaya untuk memaksimalkan substansi penyusunan sebuah Keterangan Presiden/Jawaban Termohon pada JR persidangan di MK dan MA ▪ Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor B-291/HK.00.00/12/2023 perihal rekomendasi penanganan perkara *judicial review* PUU di MA dan MK	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025
39	Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum	▪ Belum terdapat pengaturan secara detail tentang *Whistle Blowing System* (WBS); ▪ Belum ada kewajiban integrasi WBS Kemenkum dengan KPK	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2025
40	Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkum	Untuk menyelaraskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (khususnya Negative List gratifikasi)	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
41	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum	Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kemenkum	Inspektorat Jenderal	▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP	2026
42	RPermenkum Tentang Pungutan Liar	Belum terdapat peraturan turunan dari Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli	Inspektorat Jenderal	▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP	2026
43	Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkum	Regulasi sudah terlalu lama dan tidak relevan	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2026
44	Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	▪ Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Roadmap Budaya Anti Korupsi; ▪ Pengembangan dari Kepmenkum HAM tentang Pembangunan Integritas	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2027

LAMPIRAN IV:
Matriks Identifikasi Risiko

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
SS.1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI	IKSS.01.01	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP.01.01.1	Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum AHU	SP.01.01.1	Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan	1	Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif	Eksternal	1. Kementerian Luar Negeri 2. Aparat Penegak Hukum	5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan kerja sama kepada Aparat Penegak Hukum terkait Permintaan Ekstradisi yang diterima	1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Aparat Penegak Hukum terkait Permintaan Ekstradisi pada saat proses penanganan penyelesaian Permintaan Ekstradisi 2.Melakukan case work meeting antar Pimpinan Tinggi K/L untuk mengatasi masalah terjadi	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
										2	Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu	Internal		5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun skala prioritas penyelesaian Permintaan MLA berdasarkan kriteria yang ditentukan Ditjen AHU	1.Melakukan koordinasi secara intensif dalam mendorong percepatan pemenuhan MLA 2. Mengajukan permintaan perpanjangan waktu kepada negara peminta	Ditjen AHU
										3	Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia	Eksternal	1. Kementerian Luar Negeri 2. Aparat Penegak Hukum	5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar dapat melakukan pendekatan diplomatik kepada negara yang tidak merespon Permintaan MLA	1.Memberikan surat kepada negara yang tidak merespon Permintaan MLA agar dapat menindaklanjuti permintaan dimaksud 2.Melakukan penjajakan dengan negara diminta untuk membentuk perjanjian MLA dengan	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																			negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia	

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
										4	Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi	Eksternal	1.Kementerian Luar Negeri 2. Aparat Penegak Hukum	4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan revisi UU No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	1. Melakukan komunikasi/ koordinasi terbatas dengan pihak-pihak terkait sesuai SOP 2. Menyiapkan dokumen-dokumen dibutuhkan dalam proses perlawanan	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
										5	Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta)	Eksternal	1. Kementerian Luar Negeri 2. Aparat Penegak Hukum	4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan korespondensi dengan negara diminta untuk dapat menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dengan dasar perjanjian multilateral terkait Ekstradisi	1.Melakukan komunikasi secara intensif dengan negara yang tidak menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi karena tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia 2. Melakukan penjajakan dengan negara diminta untuk membentuk perjanjian ekstradisi dengan negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
										6	Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia	Eksternal	1. Aparat Penegak Hukum 2. Pemerintah Negara Lain	5	2	15	Risiko Sedang	Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam menindaklanjuti Permintaan MLA dan Ekstradisi outgoing	Melakukan case work meeting dengan otoritas berwenang terkait penanganan MLA dan Ekstradisi di negara diminta	Ditjen AHU
										7	Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA	Eksternal	Aparat Penegak Hukum	5	2	15	Risiko Sedang	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permohonan Permintaan MLA yang berpotensi adanya perlawanan atau upaya	Meminta bantuan hukum dalam menghadapi upaya hukum yang dilakukan pihak tersangka/terdakwa/terpidana dalam pemenuhan Permintaan MLA	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																		hukum lebih lanjut		
								SP.01.01.1.2	Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan	8	Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum	Internal		3	4	17	Risiko Tinggi	Menyusun timeline pengerjaan keterangan ahli/pendapat hukum agar tidak terdapat permohonan keterangan ahli/pendapat hukum yang terlewat	1.Melibatkan pegawai pelaksana untuk membantu mengumpulkan bahan terkait permohonan keterangan ahli/pendapat hukum 2.Melibatkan seluruh tim untuk untuk menyelesaikan permohonan keterangan ahli/pendapat hukum	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.1.3	Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan	9	Kurangnya Kepatuhan PPNS untuk melapor	Eksternal	K/L yang terdapat PPNS	5	2	15	Risiko Sedang	Menyusun Sistem Pelaporan PPNS	Melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan PPNS kepada K/L yang terdapat PPNS	Ditjen AHU
					SP.01.01.2	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan AHU	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU	SP.01.01.2.4	Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU	10	Adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU	Eksternal	Masyarakat pengguna layanan AHU	5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan perawatan/maintenance berkala terhadap sistem layanan Ditjen AHU	1. Meningkatkan kompetensi terhadap petugas penanganan keluhan masyarakat 2.Menangani keluhan pengguna layanan melalui media penanganan keluhan yang tersedia	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.01.01.3	Meningkatnya kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	SP.01.01.3.5	Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan	11	Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas	Eksternal	DJP Kementerian Keuangan	4	5	23	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun perjanjian kerja sama dengan DJP Kemenkeu terkait integrasi data NPWP	1.Berkoordinasi secara aktif dengan DJP Kemenkeu terkait Integrasi data Perseroan Terbatas 2.Mengarahkan pengguna layanan untuk membuat NPWP secara mandiri melalui KPP atau secara online melalui laman DJP Kemenkeu.	Ditjen AHU
										12	Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	Menyusun Service Level Agreement (SLA) Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU dengan Direktorat TI	1.Melakukan perawatan/ maintenance berkala terhadap sistem Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU 2.Meningkatkan kualitas layanan	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																			teknologi informasi	
										13	Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU	Internal		4	3	16	Risiko Tinggi	Menyusun Service Level Agreement (SLA) Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU dengan Direktorat TI	1.Melakukan perawatan/ maintenance berkala terhadap sistem Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU 2.Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi	Ditjen AHU
										14	Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan	Eksternal	Masyarakat yang mendirikan Perseroan Perorangan	4	2	12	Risiko Sedang	Berkoordinasi dengan petugas loket layanan Ditjen AHU	Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan OSS (BKPM) terkait penentuan profil risiko Perseroan Perorangan	Ditjen AHU

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.01.01.4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI	SP.01.01.4.6	Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten	15	Kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten	Eksternal	1. Masyarakat (UMKM, Umum) 2. Lembaga Pendidikan 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi-diseminasi mengenai peraturan perundang-undangan KI, menyediakan pelatihan intensif, serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan permohonan Paten	1. Melaksanakan promosi dan edukasi, penyediaan panduan yang jelas dan mudah dipahami, serta penerapan sistem review dan konsultasi internal yang efektif atas permohonan Paten 2. Melakukan pendampingan penyusunan klaim deskriptif paten kepada pemohon yang belum memenuhi persyaratan formalitas	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.4.7	Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah	17	Kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri	Eksternal	1. Masyarakat (UMKM, Umum) 2. Lembaga Pendidikan 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Melaksanakan pendampingan sosialisasi dan diseminasi edukasi kepada stakeholder terkait	1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi, promosi, diseminasi dan edukasi Desain Industri yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait 2. Mendorong stakeholder terkait untuk meningkatkan permohonan Desain Industri melalui pembentukan Sentra KI baru	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.4.8	Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru	18	Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama	Internal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Koordinasi antara Direktorat Teknis dengan Direktorat Teknologi Informasi terkait pembaruan informasi kebijakan baru	1. Membuat daftar prioritas pembaharuan fitur sistem aplikasi terdampak perubahan regulasi 2. Menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan untuk memfasilitasi selama tahap transisi.	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.4.9	Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten	19	Aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Meningkatkan kualitas sistem pencarian pada aplikasi dengan memperbaharui algoritma pencarian dan mengoptimalkan indeks pencarian dengan memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara mencari informasi yang efektif dalam aplikasi yang ada, termasuk tips dan trik pencarian	1. Melakukan pengecekan ganda di aplikasi DJKI, lalu verifikasi informasi tersebut dengan sumber lain, seperti database penelusuran paten atau konsultasi langsung dengan DJKI 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan aplikasi penelusuran Paten	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.4.10	Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual	20	Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal	Eksternal	Kantor kekayaan Intelektual yang tergabung dalam WIPO (World Intellectual Property Organization)	4	4	19	Risiko Tinggi	Pelaksanaan rapat koordinasi dan distribusi kalender pertemuan internasional	1. Menetapkan focal point/unit pengumpul & pengolah data forum internasional 2. Monitoring ketepatan waktu pengumpulan & penyampaian informasi ke forum internasional	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.01.4.11	Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar	21	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis	Eksternal	1. Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) 2. Pemerintah Daerah	4	4	19	Risiko Tinggi	Menyusun program yang mendukung peningkatan jumlah permohonan dan kualitas Indikasi Geografis yang diajukan pendaftarannya	1. Melakukan pendampingan kepada MPIG (Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis), Pemerintah Daerah, Komunitas Indikasi Geografis terkait 2. Mendorong kolaborasi antar stakeholder Indikasi Geografis: MPIG, Pemerintah Daerah, Komunitas Indikasi Geografis terkait lainnya guna meningkatkan pelindungan (kuantitas dan kualitas Indikasi Geografis terdaftar) serta pemanfaatan	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																			Indikasi Geografis	
					SP.01.01.5	Terwujudnya Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual	Indeks Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual	SP.01.01.5.12	Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual	21	Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi	Eksternal	1. Masyarakat 2. Pemilik HKI	2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Edukasi pra-mediasi mengenai manfaat & konsekuensi mediasi	1. Penandatanganan NDA (Non-Disclosure Agreement) sebelum mediasi 2. Menghentikan proses mediasi dengan hasil berita acara kegagalan mediasi	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
						Intelektual yang Profesional				22	Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi	Internal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas termasuk dalam hal penyimpanan dokumen mediasi	1. Meningkatkan sistem keamanan penyimpanan dokumen mediasi 2. Penegakan disiplin terhadap pegawai DJKI yang terlibat mediasi	Ditjen KI
					SP.01.01.6	Meningkatnya kepuasan dan manfaat layanan pembinaan hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional	SP.01.01.6.13	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah	23	Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly	Internal		5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Berkoordinasi dengan Pusadatin untuk meningkatkan kemudahan sistem pencarian dokumen dan informasi hukum	1. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi/user experience secara berkala 2. Optimalisasi kinerja aplikasi layanan dokumen dan informasi hukum	BPHN
										24	Dokumen dan		Anggota JDIHN	5	4	23	Risiko	Pendampingan	1. Monitoring dan Evaluasi	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
											informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum	Eksternal	terdiri atas a. Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada: 1. Kementerian Negara 2. Sekretariat Lembaga Negara 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Sekretariat Dewan				Sangat Tinggi	dan Koordinasi pengelolaan dokumen hukum	Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum secara berkala 2. Validasi dokumen hukum yang telah dikelola oleh kontributor	

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
													Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun							

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
													2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)							
										25	Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Inventarisasi kendala dan permasalahan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi Hukum / Aplikasi JDIHN	1. Monitoring dan Evaluasi Aplikasi JDIHN secara berkala; 2. Pengembangan, pengamanan dan perbaikan Aplikasi JDIHN secara berkala;	BPHN
										26	Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan Konsolidasi dengan Kantor Wilayah terkait pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengawasan	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																			penyelenggaraan bantuan hukum	
										27	Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Memperbaharui Standar Operasional Penyuluhan Hukum	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum 2. Penyusunan Instrumen Pengawasan Layanan Penyuluhan Hukum	BPHN
										28	Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum	Internal		3	4	17	Risiko Tinggi	Identifikasi Permasalahan dan Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Hukum	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Layanan Informasi Hukum secara berkala; 2. Melakukan Penyusunan Standar Layanan	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																			Informasi Hukum	
				Program Dukungan Manajemen	SP.01.01.7	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	SP.01.01.7.14	Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi	29	Tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi	Internal		2	4	13	Risiko Sedang	Penyelenggaraan training of facilitator pelatihan	Monitoring dan evaluasi tenaga pengajar	BPSDM Hukum
								SP.01.01.7.15	Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan	30	Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif	Internal		2	4	13	Risiko Sedang	Peningkatan kompetensi fasilitator/instruktur melalui pelatihan teknik mengajar kreatif dan inovatif.	Monitoring dan evaluasi tenaga pengajar	BPSDM Hukum

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
						Hukum														
		IKSS.01.02	Indeks Budaya Hukum (IPH)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP.01.02.8	Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI	SP.01.02.8.16	Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual	31	Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah	Eksternal	1. Pemerintah Daerah 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan 3. Perguruan Tingi 4. APH 5. Konsultan KI 6. Asosiasi KI 7.Kementerian/Lembaga/Organisasi lainnya)	4	5	24	Risiko Sangat Tingi	Menyusun program peningkatan kompetensi dan materi diseminasi terstandar	1. Melaksanakan pelatihan/pembekalan agen untuk meningkatkan kompetensi agen diseminasi KI 2. Monitoring kinerja dan persebaran agen diseminasi 3. Mendorong mitra atau stakeholder untuk menambah jumlah agen diseminasi KI	Ditjen KI

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.01.02.9	Meningkatnya kepatutan hukum Masyarakat Indonesia	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	SP.01.02.9.17	Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat	32	Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan	Internal		5	4	23	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan	1. Melakukan Penilaian Indeks Mutu Layanan Posbankum Desa/Kelurahan 2. Penyusunan Standar Operasional Layanan Pada Posbankum Desa/Kelurahan	BPHN
										33	Belum adanya data permasalahan hukum	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan konsolidasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terkait inventarisasi data permasalahan hukum	1. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait dukungan data permasalahan hukum 2. Penyusunan Konsep Peta Permasalahan Hukum	BPHN
										34	Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk	Eksternal	1.Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah	4	4	19	Risiko Tinggi	Sosialisasi dan Pembinaan Pembentukan Posbankum	1. Monitoring Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan 2. Penyusunan	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
											di Desa/Kelurahan							Desa/Kelurahan	Instrumen Hukum terkait Posbankum	
										35	Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum	Eksternal	Instansi Pengguna JF Penyuluh Hukum	3	3	14	Risiko Sedang	Pemberian Rekomendasi Kebutuhan JF Penyuluh Hukum atas usulan kebutuhan JF Penyuluh Hukum dari Instansi Pengguna	Melakukan Penghitungan Kebutuhan/ Formasi JF Penyuluh Hukum	BPHN
				Program Pembentukan Regulasi	SP.01.02.10	Meningkatnya kepatutan hukum lembaga hukum	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	SP.01.02.10.18	Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatut	36	Kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum	Eksternal	1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah	5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi-diseminasi terkait dengan Kepatuhan Hukum	1. Pengambilan data langsung melalui audiensi kepada penghasil data 2. Jika tidak didapatkan data maka dilakukan Pencarian data dari	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
									an hukum.										sumber data lainnya misal melalui artikel ataupun LAPTAH	
		IKSS.01.03	Indeks Materi Hukum (IPH)	Program Pembentukan Regulasi	SP.01.03.11	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	SP.01.03.11.19	Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat	37	Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih	Eksternal	1. Kementerian/Lembaga Terkait 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat 4. Akademisi/Pakar Ahli/LSM	4	5	24	Risiko Sangat Tinggi	Mengikutsertakan akademisi dan pakar ahli dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan	1.Melakukan kolaborasi dan pelibatan masyarakat umum terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan 2.Melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan stakeholder terkait	Ditjen PP

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
										38	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah	Internal		3	4	17	Risiko Tinggi	Meningkatkan kapasitas SDM perancang peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kualitas peraturan perundang-undangan 2. Melakukan koordinasi dengan BPHN dengan menyediakan konten yang memuat peraturan perundang-undangan yang mudah diakses dan dipahami	Ditjen PP

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.01.03.11.20	Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan	39	Tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga	Eksternal	1. Kementerian/Lembaga Terkait 2. Akademisi/Pakar Ahli/LSM	4	4	19	Risiko Tinggi	Mengikutsertakan akademisi dan pakar ahli dalam proses penghar monisasian peraturan perundang-undangan	1.Pengikutsertaan pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam rapat harmonisasi 2.Melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan/atau peran kementerian koordinator	Ditjen PP
								SP.01.03.11.21	Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem	40	Konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi	Eksternal	1. Kementerian/Lembaga Terkait 2. Masyarakat 3. Akademisi/Pakar Ahli/LSM	3	4	17	Risiko Tinggi	Melakukan sosialisasi rencana usulan konsep rancangan peraturan yang akan masuk dalam program perencanaan dan penyusunan peraturan	1.Melakukan monitoring dan evaluasi Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem 2.Melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan/atau peran kementerian koordinator	Ditjen PP

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																		perundang-undangan		

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.01.03.12	Terwujudnya manfaat dan dampak PUU terhadap pembangunan nasional	Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional	SP.01.03.12.22	Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional	41	Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga	Eksternal	1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah	3	3	14	Risiko Sedang	Penyusunan Pedoman penghitungan dampak dan manfaat	Jika tidak didapatkan data maka dilakukan Pencarian data dari sumber data lainnya misal melalui hasil kajian/penelitiuan lainnya	BPHN

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
SS.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS.02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	Program Dukungan Manajemen	SP.02.01.13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi general Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	SP.02.01.13.23	Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai	42	Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik	Internal		5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi aspek-aspek penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelatihan budaya pelayanan prima kepada seluruh satuan kerja	1.Pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) 2.Melaksanakan monev dan tindak lanjut hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik kepada setiap satuan kerja.	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.24	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum	43	Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di	Internal		5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi dan penguatan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat kepada seluruh satuan kerja	1.Pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) 2.Melaksanakan monev dan tindak lanjut hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik kepada setiap satuan kerja.	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
											seluruh satuan kerja									

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.25	Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal	4	4	Implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik	Internal		5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan sosialisasi dan penguatan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat kepada seluruh satuan kerja	1.Pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) 2.Melaksanakan monev dan tindak lanjut hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik kepada setiap satuan kerja.	Setjen
								SP.02.01.13.26	Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian	4	5	Adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid	Eksternal	Masyarakat	5	5	25	Risiko Sangat Tinggi	Membuat publikasi positif dan menarik bagi masyarakat terkait layanan / kinerja Kementerian Hukum	1.Klarifikasi Pimpinan pada berbagai media baik melalui event atau acara tertentu 2.Menyelenggarakan kegiatan kehumasan bersama media	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.27	Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar	46	Belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data	Internal		4	5	24	Risiko Sangat Tinggi	Menyusun Pedoman pengelolaan Satu Data yang meliputi arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data	1.Membuat publikasi positif dan menarik bagi masyarakat terkait layanan / kinerja Kementerian Hukum 2.Menyusun Standar Meta Data	Setjen
								SP.02.01.13.28	Kendala dalam proses pengembangan aplikasi	47	Framework aplikasi belum diperbaharui	Internal		3	5	22	Risiko Sangat Tinggi	Memperbaharui standardisasi framework aplikasi	1.Melaksanakan upgrade framework aplikasi yang terbaru 2.Melaksanakan monitoring dan evaluasi framework aplikasi	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.29	Kebocoran Data	48	Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi	Internal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Melaksanakan sosialisasi Manajemen Keamanan Informasi	1.Melaksanakan identifikaasi serangan siber 2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi	Setjen
								SP.02.01.13.30	Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum	49	Masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data	Internal		2	5	21	Risiko Sangat Tinggi	Memperbaharui SOP Tata Kelola Pusat Data	1.Pemeliharaan, peremajaan infrastruktur Pusat Data yang terkini dan pembaharuan lisensi perangkat lunak 2.Melaksanakan monitoring dan evaluasi Tata Kelola Pusat Data	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.31	Indeks budaya kerja yang masih rendah	50	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan pembinaan dan pemetaan pegawai dalam rangka pemahaman indeks budaya kerja	1. Monitoring dan evaluasi atas indeks budaya kerja 2. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi indeks budaya kerja kepada setiap satuan kerja	Setjen
								SP.02.01.13.32	Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban	51	Belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan pembinaan dan pelatihan kearsipan terkait tata kelola arsip dinamis di ingkungan Kementerian	1.menerbitkan surat edaran terkait pemaksimalan dan pembentukan ruangan arsip pada unit kerja 2.Melakukan Monev Kearsipan	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
											pengolahan Arsip									

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.33	Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN	52	Tidak Selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	1. Bersama sama dengan Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan supervisi belanja modal di lingkungan Kanwil dan UPT untuk meminimalisir ketidaksesuaian RKBMN dan RKA-KL 2. Melibatkan Perencana Anggaran, Pengguna Barang, SDM Pengelola BMN dalam Proses Penelitian	1. Menerbitkan Clearance/Tanggapan Terkait Penyelarasan RKA-K/L dengan RKBMN 2. Satker Mengajukan Revisi RKBMN di Tahun Anggaran berjalan	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																		RKBMN (Pusat dan Daerah) maupun Penyusunan Anggaran"		
								SP.02.01.13.34	Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN	5	3	Terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	Memastikan tanah dalam kondisi Clean and Clear dan telah memiliki dokumen kepemilikan terhadap	1. Mengikuti program pensertifikatan KPKNL dari Kementerian Keuangan 2.Pemutakhiran data BMN pada	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
																		peroleh an tanah baru sebelum dilakuka n permoho nan	Master Aset SIMAN	
								SP.02.01.13.35	Ketidak sesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll.	54	Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	Pembinaan dan pendampingan secara berkala dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI	1.Kegiatan koreksi akun pada aplikasi SAKTI 2.Melaksanakan Kegiatan Monev	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.36	BMN Rusak Berat tidak dapat ditindak lanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan	55	BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	1. Melakukan Identifikasi dan Pemetaan BMN Rusak Berat 2. Melakukan pembinaan penghapusan BMN pada Satuan Kerja berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan BMN rusak berat	1. Melakukan kegiatan percepatan penghapusan BMN kondisi rusak berat 2. Melakukan Monev terhadap BMN rusak berat	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.37	KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan .	56	KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan	Internal		5	3	18	Risiko Tinggi	Kegiatan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Persetujuan Penjualan BMN rusak berat	1.Menerbitkan Surat Perpanjangan Persetujuan Penjualan/ Perubahan Nilai Limit Persetujuan dan percepatan penerbitan Keputusan Penghapusan BMN rusak berat 2.Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Persetujuan Penjualan dan Keputusan Penghapusan BMN	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.38	Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru	57	Adanya perubahan regulasi Nasional	Internal		4	3	16	Risiko Tinggi	Penyelarasan regulasi karir dengan kondisi Kementerian Hukum terkini	1.Monitoring dan Evaluasi terkait pengembangan karier, pola karier dan Manajemen Talenta Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum 2.Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan tindak lanjut permasalahan lingkup pengembangan karier, pola karier dan Manajemen Talenta Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.39	Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran	58	Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran	Internal		4	3	16	Risiko Tinggi	Pendampingan penyusunan postur anggaran Kementerian Hukum yang telah memasukan SBKU di level RO	1.Melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan SBK pada tahun berjalan 2.Melakukan Revisi Anggaran antara RO yang di tagging SBKU oleh Kementerian Keuangan jika memungkinkan	Setjen
								SP.02.01.13.40	Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi	59	Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama	Internal		4	3	16	Risiko Tinggi	Menyusun Pedoman Interoperabilitas antar layanan SPBE	1.Menggunakan standar interoperabilitas yang sama antar layanan SPBE 2.Melaksanakan monitoring dan evaluasi interoperabilitas layanan SPBE	Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.41	Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib	60	Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum	Internal		4	3	16	Risiko Tinggi	Menyusun Pedoman Pengelolaan Aset TIK	1.Melaksanakan Inventarisasi kondisi Aset TIK 2.Melaksanakan monitoring dan evaluasi Daftar Aset TIK	Setjen
								SP.02.01.13.42	Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital , Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB	61	Proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru	Eksternal	1. Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	3	11	Risiko Rendah	Menyusun SOP Pelaksanaan Clearance		Setjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
								SP.02.01.13.43	Capaian Target belum maksimal	62	Adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja	Eksternal	DJP Kementerian Keuangan	3	2	10	Risiko Rendah	Mengoptimalkan penggunanan TIK untuk pencapaian kinerja dan evaluasi penggunaan anggaran untuk hal-hal yang strategis		Setjen
					SP.02.01.14	Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	SP.02.01.14.44	Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional	63	Adanya Perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negaran (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional	Eksternal	LAN	2	4	13	Risiko Sedang	Melakukan koordinasi terkait perubahan instrumen penilaian IKK dengan LAN	1. Sharing knowlegde terkait perubahan instrumen IKK 2. Sosialisasi perubahan instrumen penilaian IKK kepada UKE I	BSK Hukum

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.02.01.15	Optimalnya pengawasan intern Kementerian Hukum	Tingkat Maturitas SSIP terintegrasi Kementerian Hukum	SP.02.01.15.45	Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya	64	Tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang	Internal		4	4	19	Risiko Tinggi	Melakukan identifikasi dan internalisasi atas potensi temuan berulang	1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut temuan secara berkala 2. Melakukan analisis akar masalah (root cause analysis) atas temuan berulang dan menyusun rekomendasi perbaikan kepada Menteri Hukum	Itjen
								SP.02.01.15.46	Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi	65	Adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan	Eksternal	BPKP	1	3	5	Risiko Sangat Rendah	Koordinasi berkala dengan BPKP untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan penilaian SPIP Terintegrasi		Itjen

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Program	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)	Kode Potensi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Sumber	Stakeholder (Diisi Untuk Sumber Eksternal)	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Profil Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan
																		Pengendalian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	
					SP.02.01.16	Meningkatnya kompetensi SDM bidang hukum	Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	SP.02.01.16.47	Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum	66	Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta	Eksternal	Kementerian/Instansi Lain	3	3	14	Risiko Sedang	Rapat penentuan syarat peserta pelatihan	Koordinasi dengan instansi pengirim peserta pelatihan	BPSDM Hukum

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS